41596.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN
(Studi Terhadap Musrembang di Kecamatan Nunukan)

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

YANCE TAMBARU

NIM: 018398618

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan
(Studi Terhadap Musrenbang di Kecamatan Nunukan).

Yance Tambaru,S.E.

Universitas Terbuka

yance.tambaru@yahoo.com

Sistem perencanaan pembangunana daerah, menghendaki agar diberi ruang bagi pastisipasi masyarakat baik melalui Musrenbang Desa/Kelurahan hingga musrenbang Kabupaten. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. ternyata belum sepenuhnya melibatkan parsipasipsi masyarakat, Untuk melihat permasalahan tersebut dilakukan penelitian bagaimana dengan perencanaan dan kelerlibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Penelitian ini bertujuan : 1. Mendeskripsikan dan menganalisa implementasi proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan., 2. Mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan., 3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulis melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian melalui *Indept Interview* (wawancara mendalam), dengan menggali informasi sesuai bahan wawancara atau pertanyaan berkenaan hal-hal yang akan ditanyakan, serta dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak dilaksanakan tahapan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Nunukan, hal ini nampak ketika pihak aparat desa/kelurahan hanya mengandalkan para Ketua RT untuk menyusun usulan di wilayahnya dan kurang menghadirkan komponen masyarakat lainnya, hal lain tidak berjalankannya proses perencanaan di Kecamatan Nunukan disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pembiayaan untuk melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan, tidak adanya pembinaan dan sosialisasi kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan oleh Bappeda Kab. Nunukan berkenaan bagaimana melakukan proses perencanaan yang harus dilakukan di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRACT

Community Participation in Development Planning of Nunukan Regency

(Study of Musrenbang in Nunukan District)

Yance Tambaru,S.E.

Universitas Terbuka

yance.tambaru@yahoo.com

In a system of regional development, the central government wants to be given a space for public participation through Musrenbang rural/Urban village to the district Musrenbang. Nunukan development planning had not fully involve the participation of the community to see how the research problem with the planning and the involvement of community participation in development planning as well as factors affecting which is influencing the development planning of Nunukan Regency.

This research conducted aims : 1. Describe and analyse the implementation of the development planning process of Nunukan District,: 2. Describe and analyse the extent of community participation to participate in the planning process of Nunukan District,: 3. Describe and analyse influencing factors for community participation in development planning of Nunukan district.

This research method uses a gualitative approach, Authors approach the research object through in-dept interview to explore appropriate information of the interview or question regarding material thingsmatter will be asked and can develop in accordance with the interaction occurs in the interview process.

The result showed that not implemented the stages of region development planning with community participation in district of Nunukan, this is appears when village officials or RT urban village rely chairman to draft proposal to present less territory and other community components otherside the process of Nunukan District planning cannot be running because of limitation of time and funding to implement Musrenbang Village and District in the development and socialization to the urban village and sub-district by Bappeda of Nunukan Regency how did the process of planning to be done in RT, Village and sub-district level.

Keywords : Partisipation of Community, Planning, Development.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan (Studi Kasus Kecamatan Nunukan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Samarinda, ...

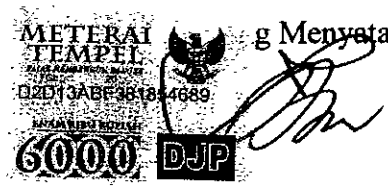

g Menyatakan

(YANCE TAMBARU,S.E.)
NIM. 018398618

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	: Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan (Studi Terhadap Musrenbang di Kecamatan Nunukan).
Penyusun TAPM	: YANCE TAMBARU,S.E.
NIM	: 018398618
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Hari/ Tanggal	: Sabtu, 14 September 2013.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Sofjan Aripin,M.Si
NIP. 196606191992031002

Pembimbing II,

Dr. Taufani C. Kurniatun,MM.
NIP. 196811071998022001

Mengetahui,

Ketua bidang Ilmu/Program
Magister Ilmu Administrasi Publik

Florentina Ratih Wulandari .S.IP, M.Si.
NIP. 197706091998022001

Direktur Program Pascasarjana

Suciati,M.Sc, PHD.
NIP. 19520213198503200

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : YANCE TAMBARU,S.E.

NIM : 018398618

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan (Studi Terhadap Musrenbang di Kecamatan Nunukan).

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 September 2013

W a k t u : 9.30 – 11.00 Wite

Dan telah dinyatakan Lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Suciati,M.Sc, PHD. .....

Penguji Ahi : Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si. .....

Pembimbing I : Dr. Sofjan Aripin,M.Si. .....

Pembimbing II : Dr. Taufani C. Kurniatun,MM. .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan anugerah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan (TAPM) Tesis ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

(1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati,M.Sc,Ph.D.

(2) Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Florentina W,S.IP, M.Si.

(3) Kepala UPBJJ-UT Samarinda, selaku penyelenggara Program Pascasarjana.

(4) Pembimbing I, Dr. Sofjan Arifin,M.Si dan Pembimbing II, Dr. Taufani C. Kurniatun,MM. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan TAPM ini;

(5) Orang Tua dan istri tercinta beserta anak-anak yang telah memberikan bantuan dukungan material dan doa selama penulis mengikuti perkuliahan ini hingga menyelesaikan program Magister ini.

(6) Rekan sejawat di Bappeda dan instansi lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan para informan yang telah anyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini .

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Akhir kata saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu terlebih khusus bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 26 Juli 2013.

Penulis,

Yance Tambaru

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

Abstrak i

Lembar Persetujuan iii

Lembar Pengesahan iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

Daftar Gambar ix

Daftar Tabel x

Daftar Lampiran xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Kajian Teori 8

1. Penelitian Terdahulu 8

2. Administrasi Publik 10

3. Partisipasi Masyarakat 12

4. Perencanaan Pembangunan 19

B. Kerangka Berfikir 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 31

A. Desain Penelitian 31

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Informan Penelitian 33

C. Instrumen Penelitian 34

D. Prosedur Pengumpulan data 34

E. Metode Analisa data 35

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Diskripsi Wilayah Penelitian 39

B. Hasil Penelitian 45

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 45

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 75

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan 112

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN..... 117

A. Simpulan 117

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 122

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1 .	Tangga Partisipasi	13
2.2.	Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif	18
2.3.	Kerangka Berfikir Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	30
3.1.	Analisis Model Interaktif (Interactive Model Analysis)	36

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan Tahun 2012	40
4.2.	Penduduk Kecamatan Nunukan Berdasarkan Kelompok Usia	41
4.3.	Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Nunukan Tahun 2012	42
4.4.	Informasi Status Kesejahteraan Individu di Kecamatan Nunukan Tahun 2012	42
4.5.	Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Nunukan Tahun 2012	44
4.6.	Jumlah Tempat Pelayanan Kesehaan di Kecamatan Nunukan	45
4.7.	Jadwal Pelaksanaan Musrenbang	47
4.8.	Pelaksanaan Musrenbang desa, Kelurahan dan Kecamatan Nunukan di Kecamatan Nunukan	48

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Pedoman Wawancara	125
2.	Matrik Hasil Wawancara dari Informan	128
3.	Foto Wawancara dengan Informan	134
4.	Biodata Penulis	136

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari UU 22 tahun 1999, memberikan penekanan dan semangat reformasi bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan keterlibatan peran serta pemerintah dan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. melalui azas keadilan dengan mempertimbangkan potensi dan keaneka ragaman daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan Negara antara Indonesia dan Malaysia juga banyak mengalami perubahan sejak terbentuk melalui UU Nomor 47 tahun 1999. Penyelenggaraan Pembangunan secara otonomi digerakan melalui ketersediaan anggaran yang cukup besar dengan menggali sumber-sumber keuangan, baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan serta sumber lain yang memberikan peluang pemerintah daerah mendapatkan anggaran guna melaksanakan pembangunan di seluruh kecamatan.

Kaca mata pemerataan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan adalah ketidakmerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Pembagian porsi dana untuk pembangunan dan peningkatan sumber daya yang ada ternyata masih dominan dialokasikan di Pulau Nunukan. yang terdiri atas Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan serta Pulau Sebatik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

yang terdiri atas 5 kecamatan. Perbedaan anggaran pembangunan dengan alokasi anggaran wilayah *mainland* Kalimantan atau 8 kecamatan yang berada di pedalaman Kalimantan mendapat porsi dana pembangunan yang lebih sedikit. Padahal kantong kemiskinan, aksesibilitas yang sulit diwilayah pedalaman sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Sering ditemui keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang tidak merata tersebut, apalagi jika dibandingkan dengan kemajuan distrik di wilayah Sabah dan Serawak, Malaysia yang berada di sepanjang perbatasan dengan Indonesia. Beberapa informasi dari masyarakat pedalaman khususnya di perbatasan menganggap warga diperbatasan sangat kurang mendapat perhatian pemerintah baik dari daerah maupun pusat. Realita yang dihadapi oleh warga perbatasan yaitu masih bergantung dengan komoditi dari negara Malaysia.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di pedalaman perbatasan negara perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah dalam menerapkan suatu sistem perencanaan pembangunan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesatuan seluruh wilayah melalui pembagian porsi pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan/observasi di Kecamatan Nunukan sebagai pusat ekonomi masyarakat, tenyata juga sulit melepaskan diri dari ketergantungan sumber daya ekonomi pendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan, dalam kaitan ini di Kecamatan Nunukan. Kebutuhan barang banyak ditopang melalui masuknya barang-barang dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Tawau, Malaysia. Kondisi ini terlihat dengan hilir mudiknya masyarakat Nunukan menuju Tawau, Sabah setiap hari melalui transportasi laut.

Proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Nunukan sebagai sentra ekonomi di Kabupaten Nunukan perlu mendapat perhatian dalam menjalankan proses perencanaan pembangunan agar sesuai dengan penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004, yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Model tahapan dalam pelaksanaan sesuah perencanaan pembangunan dimulai dari penyelenggaraan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, dan musrenbang tingkat kabupaten.

Hal penting dalam mekanisme sebuah perencanaan pembangunan yang diawali dengan dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah kelurahan/desa sampai kecamatan. Berdasarkan hasil pengamatan ternyata didapati bahwa musrenbang tersebut belum melibatkan masyarakat keseluruhan untuk memutuskan program yang diusulkan sebagai prioritas kegiatan diwilayah mereka. Sejauh ini masih terdapat kelurahan yang melaksanakan musrenbang kelurahan layaknya rapat biasa, tanpa mekanisme musrenbang yang sebenarnya. Dalam kasus ini kelurahan hanya mendaftarkan usulan dari setiap ketua RT diwilayahnya. Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan amanat partisipasi dalam pembangunan. Padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam menyusun sebuah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

perencanaan pembangunan bagi wilayahnya. Perlunya keterlibatan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan dari ketua RT, aparat desa atau para perangkat kelurahan. Tentu saja dengan proses ini upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan konstribusi usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan diwilayahnya tidak dapat terwujud.

Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi penulis ketika memperhatikan dan menghadiri kegiatan musrenbang kelurahan di salah satu kelurahan pada bulan Pebruari tahun 2012. Sesuai penjelasan pihak kelurahan mereka hanya meminta daftar usulan dari ketua RT untuk dibawa ketingkat kecamatan. Usulan yang akan disampaikan di tingkat kecamatan adalah usulan program usulan musrenbang tahun 2011 yang tidak terakomodir serta ditambah dengan usulan 2012 dari para ketua RT.

Pada kejadian lain terdapat juga kelurahan yang hanya mengadakan rapat biasa tanpa melalui sebuah mekanisme pelaksanaan musrembang dengan hanya mengundang para ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat. Pihak kelurahanlah yang kemudian menghimpun seluruh daftar usulan kegiatan tanpa membuat daftar urutan prioritas usulan yang akan disampaikan kepada pihak kecamatan sebagai usulan dari kelurahan. Kondisi ini terjadi karena pihak kelurahan hanya melaksanakan musrenbang sebagai bentuk formalitas menampung usulan yang akan dibawa dalam musrenbang tingkat yang lebih tinggi untuk menjawab surat edaran dari Camat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Persoalan lain yaitu jadwal musrenbang kelurahan yang terlalu singkat waktunya dan metode pelaksanaan musrenbang kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang bersifat seadanya tanpa mekanisme musrenbang serta undangan yang sengaja dibatasi karena alasan pendanaan. Masalah yang menjadikan forum Musrenbang tidak memperhatikan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-undang karena Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah kurang memenuhi unsur kebutuhan yang sangat mendesak sesuai usulan Musrenbang. Pelaksanaan pembangunan justru banyak mengakomodir usulan anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah di tingkat kelurahan masih mengabaikan proses Musrembang kelurahan dan hanya membuat daftar usulan yang akan diusulkan dalam Musrenbang. Akibat dari pengumpulan tersebut sehingga usulan dari kelurahan menjadi sangat tebal, dan tidak mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Tidak adanya pengklasifikasian terhadap program yang diusulkan. Pemilahan usulan yang akan disampaikan pada musrenbang kecamatan, melalui PNPM perkotaan serta program yang merupakan kegiatan swadaya masyarakat sendiri.

Hal yang sama juga terjadi pada Musrenbang kecamatan, berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika mengikuti Musrenbang kecamatan Nunukan pada Februari 2012, daftar usulan dari 1 desa dan 4 kelurahan masuk beberapa hari sebelum pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Kecenderungan penyusunan skala prioritas usulan yang akan diajukan dalam Musrenbang kabupaten merupakan rumusan aparat kecamatan berdasarkan daftar usulan dari masing-masing desa dan kelurahan. Hal ini dapat dilihat ketika proses

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Musrenbang kecamatan tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum Musrenbang tersebut, karena daftar usulan kegiatan sebagai hasil Musrenbang kecamatan yang akan diusulkan ke kabupaten sudah di *printout* oleh pihak kecamatan, kemudian ditambah usulan baru yang berkembang dalam Musrenbang kecamatan.

Adanya kecenderungan kurangnya tingkat kehadiran *stakeholders* penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah yang membawa dampak tidak optimalnya proses musrenbang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta musrenbang kecamatan bahwa kehadiran peserta dalam musrenbang kecamatan semata-mata hanya memenuhi undangan camat. Ada juga yang tidak memahami mekanisme Musrenbang kecamatan. Banyak diantara mereka tidak ada upaya pengajuan usulan dan juga tidak mau mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Forum Musrenbang kecamatan hanya tempat mendengarkan kritikan, protes kepada pemerintah daerah dan SKPD tertentu.

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam menyusunan perencanaan daerah melalui mekanisme musrenbang, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Bagaimanakah proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mendeskripsikan dan menganalisa proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Nunukan.
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

UNIVERSITAS TERBUKA

41596.pdf

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Wilayah Penelitian

1. Posisi Geografis

Kabupaten Nunukan merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang berada di beranda terdepan NKRI dengan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Kabupaten Nunukan memiliki 15 Kecamatan yang mana salah satu kecamatan merupakan pusat perekonomian yakni Kecamatan Nunukan. Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Nunukan sebanyak ± 74.455 Jiwa, dengan luas wilayah 1.596,77 Km^2 atau sekitar 11,19% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Sebagai kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk ± 92,41 Jiwa/Km^2, Kecamatan Nunukan memiliki batas-batas wilayah yaitu :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Sebuku
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Sembakung.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sabah, Malaysia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Sebatik Barat.

Wilayah Kecamatan Nunukan memiliki kemiringan yang bervariasi, yang secara umum dikategorikan kedalam 4 (empat) kelas kemiringan, yaitu :

- Kemiringan 0-2 % : Datar (sekitar 130.908,00 ha)
- Kemiringan 2-15% : Bergelombang (sekitar 28.122,00 ha)
- Kemiringan 15-40 % : Curam (sekitar 647,00 ha)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

- Kemiringan >40 % : Sangat curam (- ha)
- Di atas permukaan laut : 0 -1000 m

2. Kependudukan

Jumlah Penduduk yang bermukim di kecamatan Nunukan pada Desember tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan, Tahun 2012

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah RT	Penduduk (jiwa)			Jumlah Keluarga (KK)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Nunukan Timur	19	11.747	10.270	22.017	6.340
2.	Nunukan Barat	24	9.933	8.580	18.513	4.873
3.	Nunukan Utara	11	5.953	5.135	11.088	3.338
4.	Nunukan Tengah	20	9.262	8.303	17.565	1.350
5.	Binusan	15	2.934	2.338	5.272	4.788

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Nunukan. Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Nunukan diakhir bulan Desember 2012 berjumlah ± 74.455 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 20.689 KK. berdasarkan jenis kelamin penduduk Kecamatan Nunukan yaitu laki-laki sebanyak 39.829 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 34.626 Jiwa, yang berdomisili di 169 RT.

Komposisi pendudukan di Kecamatan Nunukan menunjukan bahwa kelompok usia 21-50 yang merupakan usia produktif mendominasi dengan pencapaian 51,3 % dari jumlah pendudukan Kecamatan Nunukan. Berikut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

disajikan komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, yang turut berperan dan menggerakan ekonomi Kecamatan Nunukan, yang tersaji dalam Tabel. 4.2.

Tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Nunukan Berdasarkan Kelompok Usia, Tahun 2012.

KELOMPOK USIA	JUMLAH PENDUDUK
0 – 10 Tahun	19.501
11 – 20 Tahun	12.397
21 – 30 Tahun	13.028
31 – 40 Tahun	12.195
41 – 50 Tahun	7.832
51 – 60 Tahun	3.343
61 – 70 Tahun	1.157
70 + Tahun	805

Sumber : BPS Kabupaten Nunukan, Tahun 2013.

Kecamatan Nunukan sebagai pusat perekonomian masyarakat ternyata juga memiliki kelompok masyarakat yang miskin, yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan juga bisa mereka rasakan dan mereka dalam dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan. Berikut disajikan informasi status kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu yang berada dalam internal 0 – 30% (kategori tingkat kesejahteraan).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.3. Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Nunukan Tahun 2012.

Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga			Jumlah
	s/d 10%	11 – 20%	21 – 30%	
Nunukan Tengah	180	144	172	1.258
Nunukan Barat	134	214	249	1.469
Nunukan Timur	266	291	281	798
Nunukan Utara	56	151	201	319
Binuan	108	166	159	579

Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan, Tahun 2012.

Sedangkan jumlah penduduk yang berada pada tingkat status kesejahteraan perlu penanganan secara khusus oleh pemerintah di Kecamatan Nunukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4. Informasi Status Kesejahteraan Individu di Kecamatan Nunukan Tahun 2012.

Wilayah	Jumlah Rumah Tangga			Jumlah
	s/d 10%	11 – 20%	21 – 30%	
Kecamatan Nunukan	5.249	5.398	4.963	15.610

Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan, Tahun 2012.

Data diatas menunjukan bahwa masyarakat pra sejahtera di Kecamatan Nunukan menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 4.423 Rumah tangga, dan sejumlah 15.610 warga masyarakatnya berada dalam kategori miskin. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah daerah jika program pembangunan didaerah diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

3. Perekonomian

Sebagai wilayah kecamatan yang memiliki penduduk yang terpadat, kecamatan Nunukan merupakan salah satu tempat yang paling banyak diminati oleh para pendatang baik yang berasal dari dalam negeri maupun warga Indonesia yang kembali ke setelah tidak lagi bekerja di Malaysia. Hal ini disebabkan peluang usaha dan roda ekonomi di kecamatan ini cukup baik di bandingkan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Nunukan. Apalagi Sebagai wilayah yang merupakan daerah perbatasan dengan Negara luar, banyak juga pelancong Warga Negara Malaysia yang berkunjung ke Kecamatan Nunukan. Hal ini disebabkan hubungan kekerabatan, sosial budaya antar warga yang berada di Sabah, Malaysia dengan warga di Wilayah Kabupaten Nunukan. Sedangkan kunjungan lain berasal dari pelaku bisnis antar kedua wilayah. Aktifitas kunjungan ini juga turut membantu perekonomian sebagian masyarakat di kecamatan Nunukan.

Konstribusi terbesar sebagai penggerak perekonomian masyarakat di kecamatan Nunukan berasal dari sektor perdagangan, Hotel, Restaurant, industri pengolahan, perkebunan dan sektor jasa.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Sektor Pendidikan di Kecamatan Nunukan menjadi bagian yang penting sebagai sektor yang berperan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manuisa akan jadi motor penggerak pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berupaya untuk memenuhi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

segala fasilitas/sarana pendidikan, mutu pendidikan baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi diseluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan, melalui penyediaan anggaran pendidikan 20% dari APBD Kabupaten Nunukan. Sarana Pendidikan dan kesehatan yang ada di kecamatan Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Nunukan, Tahun 2012.

No	KETERANGAN	FASILITAS PENDIDIKAN			
		TK	SD	SMP	SMA/SMK
1.	Jumlah Sekolah	11	19	9	7
2.	Jumlah Siswa	487	7.984	2.369	2.226
3.	Jumlah Guru	59	350	128	144

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan, Tahun 2013

Sektor kesehatan adalah juga memegang peranan penting dalam melihat kualitas manusia di Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menjalankan amanat Undang-Undang dalam menyediakan anggaran kesehatan sebesar 10%, dengan memperhatikan kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu menempatkan 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kecamatan Nunukan. Melalui Dinas Kesehatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Kecamatan Nunukan, yang secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Tabel 4.6. Jumlah Tempat Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Nunukan.

No.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Rumah Sakit Umum	1
2.	Rumah Sakit Bersalin	2
3.	Poliklinik	1
4.	Puskesmas Induk	1
5.	Apotik dan Toko Obat	16
6.	Puskesmas Pembantu	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Tahun 2012.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Sebagai pelaksanaan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan baik bersifat jangka panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana kerja pembangunan (RKP) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamatkan bahwa wahana partisipasi masyarakat didaerah adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Kegiatan Musrenbang kecamatan Nunukan tahun 2013 merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapat masukan dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan dikecamatan Nunukan yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah diwilayah kecamatan Nunukan, yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada tahun berikutnya.

Musrenbang Kecamatan Nunukan tahun 2013 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan dilaksanakan oleh Camat, melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 050/555/Bapp-II/Perc-Prog/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Dan selanjutnya pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Camat Nunukan kepada kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Nunukan, Nomor : 050/24/CN-III/I/2013 Perihal Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Desa Kecamatan Nunukan. tanggal 08 Januari 2013.

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Nunukan, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, bertujuan untuk :

a. Membahas dan Menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi prioritas di kecamatan Nunukan.
b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Nunukan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Nunukan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD di Kabupaten Nunukan.

d. Menyiapkan Dokumen usulan prioritas Kecamatan dan sekaligus menentukan peserta yang akan dikirim ke Musrenbang Kabupaten.

Berikut jadwal pelaksanaan musrembang dari tingkat desa hingga Nasional :

Tabel 4.7. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang

No.	Tingkatan Musrenbang	Bulan				
		1	2	3	4	5
1.	Desa/kelurahan	☆				
2.	Kecamatan		☆			
3.	Kabupaten			☆		
4.	Provinsi				☆	
5.	Nasional					☆

Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan

Memperhatikan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang dari Kementrian Negara PPN/Bappenas dan Departemen Dalam Negeri, Nomor 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007, maka pelaksanaan perencanaan melalui Forum Musrenbang di Kecamatan Nunukan dilaksanakan sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL.4.8. PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN NUNUKAN DI KECAMATAN NUNUKAN

NO.	DESA,KELURAHAN DAN KECAMATAN	HARI, TANGGAL DAN WAKTU	PESERTA MUSRENBANG		JUMLAH PESERTA YANG MEMBERIKAN		RINCIAN PESERTA
			UNDANGAN	HADIR	PENDAPAT/ PERTANYAAN	TANGGAPAN/ JAWABAN	
1.	DESA BINUSAN	28 Januari 2013 09.00 – 11.30 Wite	57 orang	34 orang	4 orang	3 orang	- ketua RT. - Tokoh masyarakat. - Masyarakat - Pengurus BPD
2.	KELURAHAN NUNUKAN UTARA	14 Januari 2013 09.00 – 11.30 Wite	59 orang	57 orang	13 orang	6 orang	- ketua RT. - Tokoh masyarakat. - Masyarakat - organisasi wanita - Instansi Vertikal. - SKPD
3.	KELURAHAN NUNUKAN BARAT	9 Januari 2013 09.00 – 11.45 Wite	60 orang	50 orang	10 orang	3 orang	- ketua RT. - Tokoh masyarakat. - Masyarakat - organisasi wanita - Instansi Vertikal.
4.	KELURAHAN NUNUKAN TIMUR	15 Januari 2013 09.00 – 12.00 Wite	33 orang	23 orang	5 orang	5 orang	- ketua RT. - Tokoh masyarakat. - Pengurus LPM - organisasi wanita
5.	KELURAHAN NUNUKAN TENGAH	22 Januari 2013 09.00 – 12.00 Wite	70 orang	61 orang	15 orang	3 orang	- ketua RT. - Tokoh masyarakat. - Pengurus LPM - organisasi wanita - SKPD
6.	KECAMATAN NUNUKAN	12 Pebruari 2013 09.00 – 12.00 Wite	200 orang	193 orang	10 orang	3 orang	- ketua RT. - Anggota DPRD - Tokoh masyarakat. - Pengurus LPM - SKPD - organisasi wanita

UNIVERSITAS TERBUKA

41596.pdf

a. Musrenbang Kelurahan Nunukan Timur.

Kelurahan Nunukan Timur menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan pada tanggal 15 Januari 2013, yang dihadiri 23 orang terdiri ketua RT, Tokoh masyarakat, Pengurus LPM, dan organisasi wanita. Para peserta Musrenbang Kelurahan Nunukan Timur yang hadir sudah biasa menghadiri rapat seperti ini karena memang olen pihak Kelurahan dalam rapat yang sering diadakan di Kelurahan mereka lebih sering menghadirkan pihak-pihak tersebut. Seperti yang diutarakan oleh ketua RT 10 berikut ini :

> "Saya datang rapat musrenbang ini sudah biasa karena kami memang sering diundang pak Lurah kalau ada rapat-rapat yang dihadiri warga, apalagi rapat seperti ini setiap tahun saya hadir untuk bawa usulan dari RT saya" (Wawancara tanggal 13 Pebruari 2013).

Demikian juga yang diutarakan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang diundang, yaitu bapak Ir, berikut ini :

> "Senang juga diundang pak Lurah,sudah lama tidak hadir kalau diundang, ini perlu saya hadir, apa lagi katanya mau membicarakan usulan warga yang perlu dikerjakan nanti sama pemerintah daerah" (wawancara tanggal 13 Pebruari 2013).

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa masyarakat tahu bahwa mereka hadir pada musrenbang Kelurahan ini untuk menyampaikan dan membicarakan usulan masyarakat dari tempat tinggal mereka.

Pihak Kelurahan juga mengundang pihak-pihak lain selain ketua RT yakni tokoh masyarakat dan pengurus PKK dengan alasan bahwa mereka yang diundang ini dianggap sudah mewakili unsur masyarakat lainnya dan yang hadir dianggap sudah tahu usulan apa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

yang perlu mewakili warga yang lain. Proses perencanaan Musrenbang diselenggarakan selama sehari dari jam 09.00 – 12.00 wite. Melalui informasi dari Kepala Seksi Sosbud dan Kesra Kelurahan Nunukan Timur mengatakan bahwa :

> " yang saya tahu kenapa pak Lurah tidak mengundang semua, karena RT dianggap tahu kondisi warganya dan apa yang dibutuhkan warganya, kami juga mengundang PKK dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan atau ada tambahan usulan baru dari mereka". (wawancara tanggal 21 Mei 2013).

Proses perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Timur dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Tahap persiapan, terdiri dari pembagian undangan Lurah Nunukan Timur sebanyak 43 lembar yang ditujukan kepada para ketua RT, Tokoh masyarakat, Pengurus LPM, dan organisasi wanita untuk hadir dapat rapat Musrenbang Kelurahan. Dalam undangan juga disampaikan agar peserta rapat menyertakan daftar usulan yang akan dibahas dalam rapat Musrenbang. Sebelum rencana pelaksanaan Musrenbang kelurahan, para Ketua RT tidak diberitahu agar dalam menyusun usulan terlebih dahulu melakukan rapat di tingkat RT/kelompok. Permasalahan ini disebabkan Lurah tidak membentuk tim fasilitator yang tugasnya sebagai fasilitator musyawarah ditingkat RT/dusun/kelompok, dan sekaligus memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Nunukan Timur.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

2) Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :

- Sesuai jumlah undangan yang telah disebarkan oleh aparat kelurahan, ternyata yang hadir mengikuti rapat sebanyak 33 orang ditambah 4 orang dari aparat kelurahan.
- Pertemuan Musrenbang Kelurahan dimulai dengan pembukaan oleh Lurah Nunukan Timur yaitu Yudi Hamdani,S.Sos, yang menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih karena bersedia hadir dalam rapat di Kelurahan, juga mengharapkan agar dalam rapat ini para hadirin bisa memberikan masukan usulan yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat Kecamatan. Setelah itu disambung dengan pembacaan doa oleh Ustad Ma'fud.
- Pemaparan oleh Lurah, Yudi Handani,S.E tentang maksud dan tujuan Musrenbang dan teknis pelaksanaan rapat, serta memaparkan tentang program yang diprioritaskan di kelurahan Nunukan Timur, dan beberapa contoh kegiatan yang perlu diusulkan oleh para undangan.
- Rapat membicarakan usulan dari 19 RT yang dipandu oleh Lurah, peserta rapat yang memberikan pendapat yaitu sebanyak 5 orang, yaitu Bpk. Suwardi (RT. 5), Bpk. H. Wasfi (RT. 19), Bpk. Ardi (RT.10), Bpk. Jaisyul (RT.18), bpk. H. Halim (RT. 1). sedangkan yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan selain Lurah dan aparat Kelurahan juga beberapa Tokoh masyarakat yang berjumlah 5 orang. Pada kesempatan ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

ternyata sebagian usulan tidak disiapkan oleh ketua RT, hanya beberapa ketua RT saja yang membawa usulan warganya. Ternyata usulan yang disampaikan oleh ketua RT cukup banyak, maka Pak Lurah meminta agar ketua RT dan para undangan mengurangi usulannya, dibatasi yang penting-penting saja, agar usulan yang akan disampaikan ke Kecamatan tidak terlalu banyak. Rapat dilanjutkan dengan mendengar masukan dari peserta rapat apakah ada usulan tambahan, dan ternyata banyak usulan baru diusulkan dan diterima sebagai usulan yang akan diteruskan ke Musrenbang Kecamatan, sedangkan Ketua RT yang tidak membawa usulan, diminta untuk disampaikan saja dalam rapat Musrenbang ini dan kemudian ditampung oleh aparat kelurahan. Dalam rapat ini juga berkembang diskusi apakah usulan ini nantinya akan ditanggapi oleh Pemerintah Daerah karena cukup banyak usulan yang lalu yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, seperti pembangunan jembatan penghubung dua RT, semenisasi, insentif bagi petugas posyandu dan lain-lain.

3) Keluaran

Daftar usulan dari Kelurahan Nunukan Timur yang sudah disusun oleh aparat Kelurahan berupa daftar kegiatan sesuai urutan prioritas setiap RT dan tambahan kegiatan yang diusulkan peserta rapat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

4) Peserta

Peserta Musrenbang sesuai undangan dari Kelurahan Nunukan Timur yaitu sebanyak 33 orang, yang terdiri dari Tokoh masyarakat sebanyak 5 orang, ketua RT sebanyak 19 orang, organisasi wanita sebanyak 5 orang, ditambah aparat kelurahan sendiri sebagai panitia sebanyak 4 orang.

5) Narasumber

Lurah Nunukan Timur.

b. Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah.

Kelurahan Nunukan Tengah menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan pada tanggal 22 Jaunari 2013, yang dihadiri 61 orang terdiri dari para Ketua RT (merangkap Pengurus LPM), pengurus PKK, Tokoh masyarakat dan dinas terkait. Para undangan Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah yang hadir khususnya para ketua RT sudah mengetahui satu minggu sebelum pelaksanaan karena ditelpon oleh staf kelurahan, yang sekaligus menyampaikan jika terdapat usulan baru yang akan dibahas pada Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah. Seperti yang diutarakan oleh ibu ketua RT 16 berikut ini :

> " saya sebelumnya ditelpon oleh staf kelurahan, adakah usulan tambahan untuk dimasukan dalam Musrenbang nanti? Saya bilang tambahannya hanya pembuatan drainase di lokasi X, jadi usulan tidak banyak kok" (Wawancara tanggal 16 Pebruari 2013).

Ternyata usulan-usulan dari RT 16 selain usulan tambahan sudah ada sejak lama di kantor Kelurahan, berdasarkan informasi dari ketua RT dan proposal yang sudah dibuat oleh warga di RT 16 yang telah direkomendasi oleh ketua RT.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Undangan yang hadir pada forum Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah sebenarnya sudah biasa menghadiri Musrenbang setiap tahunnya, hanya beberapa orang saja yang merupakan wajah baru karena merupakan pejabat RT yang baru, seperti yang diutarakan oleh salah seorang ketua RT yang baru, yaitu bapak AS, berikut ini :

> " .....saya baru kali ini ikut acara Musrenbang, saya tidak membawa usulan, nanti saja saat rapat baru saya sampaikan usulan kalau diminta, saya tahu kok kegiatan apa yang bisa diusulkan sama ibu Lurah..... " (wawancara tanggal 13 Pebruari 2013).

Komentar lain disampaikan oleh tokoh masyarakat menyikapi undangan Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kelurahan ini, sebagai berikut :

> " .....saya sudah sering ikut Musrenbang, memang ada juga usulan yang dikerjakan oleh Pemda, tetapi lebih banyak kegiatan yang tidak masuk di Musrenbang Kelurahan justru itu yang dikerjakan, contoh, pembuatan penutup parit di tempat X, ditempat lain juga ada, percuma sama kita rapat tapi pemerintah lebih memperhatikan usulan proposal yang tidak melewati Musrembang ini..... " (wawancara 15 Pebruari 2013).

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa para undangan bahwa forum Musrenbang Kelurahan ini hanya merupakan pertemuan biasa dengan ibu Lurah yang sekaligus mereka menyampaikan usulan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah di wilayah Nunukan Tengah, dan mereka tidak terlalu bersemangat untuk mempersiapkan usulan-usulan tersebut, karena khawatir tidak diakomodir lagi oleh pemerintah daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Proses perencanaan diselenggarakan selama sehari dari jam 09.00 – 12.00 wite. Ibu Lurah berusaha untuk melibatkan warganya ikut dalam proses Musrembang ini, berikut petikannya :

> "…….. saya sudah menyampaikan kepada ketua RT, agar sebelum pembahasan dalam Musrenbang Kelurahan agar terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan warganya membahas usulan prioritas mana yang akan disampaikan di Musrenbang Kelurahan, tapi ternyata hanya beberapa RT saja yang melakukannya, banyak ketua RT yang tidak membuat pertemuan dengan warganya, saya tidak bisa memaksakannya, lalu kalau saya undang semua, perlu pendanaan yang besar, padahal anggaran kami hanya sedikit saja, maklumlah anggaran kelurahan kan kecil" (wawancara tanggal 15 Pebruari 2013).

Proses perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Tengah dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Tahap persiapan, terdiri dari penyampaian staf kelurahan menghubungi para ketua RT melalui Undangan yang diedarkan sebanyak 70 lembar undangan, disertai dengan komunikasi telepon untuk mengingatkan undangan dan usulan tambahan yang perlu dibawa dari ketua RT masing-masing. Usulan tersebut sebagai tambahan terhadap usulan yang sudah ditampung terlebih dahulu oleh aparat kelurahan di Kelurahan Nunukan Tengah. Berdasarkan informasi dari ibu Lurah bahwa diharapkan para ketua RT bisa melakukan pertemuan pendahuluan dengan warga untuk menghasilkan daftar kegiatan yang akan diusulkan nanti saat Musrenbang kelurahan. Pihak Kelurahan tidak membentuk tim fasilitator, dengan alasan tidak ada pembiayaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

41596.pdf

2) Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :

- Pembukaan oleh ibu Lurah yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan yang walaupun mempunyai kesibukan, namun masih menyempatkan untuk datang pada acara musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) di tingkat kelurahan nunukan tengah.
- Pemaparan oleh ibu Lurah, Halimah, S.STP tentang maksud dan tujuan Musrenbang serta daftar usulan kelurahan yang belum diakomodir oleh SKPD walaupun merupakan prioritas di kelurahan. Paparan lurah juga menjelaskan tentang bagaimana pemilahan usulan yang akan dimasukan dalam program PNPM perkotaan, serta program APBD Kab. Nunukan tahun 2014.
- Rapat membahas usulan yang sudah disiapkan oleh RT yang dipimpin Lurah dan sekaligus meminta jika ada tambahan usulan yang dianggap mendesak oleh para hadirin untuk diusulkan. Adapun yang memberikan pendapat atau pandangannya yaitu sebanyak 15 orang. Sedangkan yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan peserta yaitu Lurah Nunukan Tengah, Sekretaris Lurah Nunukan timur, dan Kasi. PMD Kelurahan Nunukan Timur. Dalam rapat ini juga sekaligus membuat usulan yang akan dilaksanakan pembangunannya melalui program PNPM perkotaan, jadi rapat ini membahas kegiatan pembangunan mana yang diusulkan ke tingkat Musrenbang Kecamatan dan usulan kegiatan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

diarahkan pada program PNPM Perkotaan. Pada pertemuan ini pimpinan rapat meminta agar para Ketua RT dan tokoh masyarakat menyampaikan usulan masing-masing, kemudian masing-masing usulan tersebut dibahas satu persatu. Dari pembahasan tersebut kegiatan yang tidak terlalu penting agar dikeluarkan dari usulan. Hasil dari usulan yang telah disepakati kemudian dibuat daftar usulan yang kemudian disiapkan untuk dikirim ke kantor kecamatan nunukan. Dibahas juga pertimbangan pengalaman lalu dimana usulan yang banyak kepada SKPD tetapi realisasinya pekerjaan yang dilaksanakan sesuai usulan hanya sedikit. selama rapat berlangsung hingga selesainya dapat berjalan dengan lancar. Rapat ditutup oleh Lurah sekaligus menikmati makanan yang telah dihidangkan.

3) Keluaran

Daftar usulan yang sudah disusun oleh aparat Kelurahan berdasarkan prioritas yang disusun oleh ketua RT dan peserta rapat, sekaligus penyusunan daftar kegiatan yang disesuaikan dengan sumber pendanaan (seperti : kegiatan PNPM Perkotaan dan APBD Kabupaten Nunukan).

4) Peserta

Peserta Musrenbang sesuai undangan dari Kelurahan Nunukan Timur yaitu sebanyak 61 orang, yang terdiri dari Ketua RT sebanyak 20 orang, Tokoh masyarakat sebanyak 40 orang,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

organisasi wanita sebanyak 1 orang, aparat kelurahan sebanyak 4 orang ditambah dinas teknis, yaitu SKPD DKPPK.

5) Narasumber

Lurah Nunukan Tengah, yaitu Halimah, SSTP.

c. Musrenbang Kelurahan Nunukan Barat.

Kelurahan Nunukan Barat menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan pada tanggal 9 Januari 2013, yang dihadiri 50 orang terdiri dari para Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi wanita, SKPD, dan masyarakat. Para undangan Musrenbang Kelurahan Nunukan Barat yang hadir khususnya para ketua RT sudah membawa usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum Musrenbang Kelurahan. Para ketua RT baru menyiapkan usulan tersebut setelah menerima undangan menghadiri Musrenbang dari Lurah Nunukan Barat, Seperti yang diutarakan oleh salah seorang ketua RT berikut ini :

> "... setelah saya menerima undangan dari pak Lurah bahwa akan dilaksanakan Musrenbang Kelurahan, baru kemudian saya menyiapkan usulan dari RT saya, kebetulan saya tahu akan permasalahan dan usulan apa yang diperlukan untuk proyek di lingkungan RT saya." (Wawancara tanggal 21 Pebruari 2013).

Berbeda dengan komentar dari ketua RT yang lain, yang menyampaikan komentar sebagai berikut :

> "... saya sudah menyiapkan usulan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kelurahan, karena biasanya memang awal tahun Musrenbang dilaksanakan, dan juga sudah ada warga yang menyampaikan proposal yang akan juga diusulkan ke Pemda, minta surat dari Pak Lurah dulu " (Wawancara tanggal 20 Pebruari 2013).

Undangan yang hadir pada forum Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah rata-rata sudah biasa menghadiri Musrenbang setiap tahunnya,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

hanya beberapa orang saja yang merupakan wajah baru karena mereka adalah perorangan yang hadir bersama dengan ketua RT untuk mengupayakan agar usulan lewat proposal mereka dapat juga masuk dalam usulan di Musrenbang Kelurahan.

Demikian yang diutarakan oleh salah seorang peserta rapat, berikut ini :

> " saya baru kali ini ikut acara Musrenbang, katanya kalau mau proposal saya dimasukan dalam usulan musrenbang, maka saya juga diminta hadir, itung-itung untuk mengecek apakah proposal saya bisa masuk, kalau sudah masuk nanti tinggal saya ikuti untuk bisa saya dapat" (wawancara tanggal 20 Pebruari 2013).

Ada lagi komentar dari tokoh masyarakat menyikapi undangan Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kelurahan, sebagai berikut:

> " Usulan Musrenbang itu juga nanti tidak dipakai juga, karena usulan yang disampaikan ke pak Lurah dengan yang dikerjakan di kelurahan ini juga akan lain,capek saja kita rapat " (wawancara tanggal 7 Pebruari 2013).

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa para undangan forum Musrenbang Kelurahan ini hanya untuk menyampaikan usulan kepada pak Lurah dan sekaligus proposal pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah di wilayah mereka, dan ada juga yang sebenarnya kurang bersemangat mengikuti musrenbang ini, mereka hadir sebatas demi menghargai undangan.

Proses perencanaan Musrenbang ini diselenggarakan selama sehari dari jam 09.30 – 11.45 wite. Pak Lurah berusaha untuk melibatkan warganya ikut dalam proses Musrembang ini, berikut petikannya :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

> "…….. saya sudah menyampaikan kepada ketua RT, agar para ketua RT sebelum pembahasan dalam Musrenbang Kelurahan terlebih dahulu mempersiapkan usulan lalu informasikan ke warga untuk memberikan masukan usulan prioritas mana yang akan disampaikan di Musrenbang Kelurahan, tapi banyak ketua RT yang tidak membuat pertemuan dengan warganya, karena ternyata sudah banyak proposal yang masuk daftar Pak RT yang akan diusulkan nantinya" (wawancara 21 Pebruari 2013).

Proses perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Tengah dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Tahap persiapan, terdiri dari penyampaian undangan lurah sebanyak 60 lembar untuk menghadiri undangan Lurah Nunukan Barat yaitu acara Musrenbang. Pihak Kelurahan tidak membentuk fasilitator yang membantu agar usulan dari tingkat RT sudah merupakan usulan dari warga masyarakat, bukan saja usulan warga yang dibuatt lewat proposal.
2) Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :
   - Pembukaan oleh Lurah Drs. Hasan Basri mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para undangan. Selanjutnya dilakukan pembacaan doa oleh H. Sabran.H.M.S. setelah acara pembukaan dilakukan penjelasan oleh Lurah seberapa pentingnya musrenbang ini terhadap pembangunan di wilayah Kelurahan, dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme rapat.
   - Rapat penyampaian usulan yang sudah disiapkan oleh RT dan tambahan usulan baru dari hadirin, lalu seluruh usulan tersebut di dokumentasikan sebagai usulan yang akan di bawa ketingkat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Musrenbang Kecamatan. Pihak Kelurahan menganggap bahwa usulan yang masuk sudah merupakan usulan prioritas. Harapan dengan usulan yang banyak maka kegiatan yang dilaksanakan diwilayah kelurahan nunukan barat bisa lebih banyak. Pada rapat ini terdapat 10 orang yang mengajukan pertanyaan dan pendapat, sedangkan yang memberikan jawaban atas penrtayaan yaitu pak Lurah, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Ketua RT. Pada menjelang akhir pertemuan pak Lurah menekankan agar para pemohon yang telah membuat proposal agar bisa disampaikan kepada SKPD terkait sebagai pendukung usulan kelurahan yang akan dibahas pada tingkat Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Selama rapat berlangsung termasuk mendengarkan komentar dari peserta rapat, tanggapan dari pihak kelurahan bahkan hingga selesai rapat berjalan dengan lancar. Rapat ditutup oleh Lurah sekaligus menikmati kue dan minuman yang telah dihidangkan.

3) Keluaran

Daftar usulan yang sudah disusun oleh aparat Kelurahan berdasarkan hasil rapat sebagai bahan yang akan disampaikan ke pihak Kecamatan Nunukan, sekaligus penyampaian agar proposal yang sudah ada perlu segera diajukan ke dinas teknis.

4) Peserta

Peserta Musrenbang sesuai undangan dari Lurah Nunukan Barat yaitu sebanyak 50 orang, yang terdiri dari Tokoh masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

sebanyak 2 orang, Ketua RT sebanyak 23 orang, organisasi wanita 2 orang, masyarakat biasa sebanyak 20 orang ditambah pegawai kelurahan sebanyak 2 dan instansi yang hadir dari TNI Angkatan Darat (Koramil).

5) Narasumber

Lurah Nunukan Barat.

d. Musrenbang Kelurahan Nunukan Utara.

Kelurahan Nunukan Utara menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan pada tanggal 14 Januari 2013, yang dihadiri 57 orang terdiri dari para Ketua RT dan organisasi wanita, masyarakat, instansi vertikal, SKPD dan tokoh masyarakat. Para undangan Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah yang hadir khususnya para ketua RT sudah mengetahui sebelumnya kalau Musrenbang akan dilakukan melalui penyampaian pak Lurah di kantor Kelurahan, perlu menyiapkan usulan dari RT masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang ketua berikut ini :

> "... saya sudah menyiapkan usulan dari warga, kemarin saya keliling sambil berbicara dengan warga, kira-kira usulan apa yang perlu disampaikan pada Musrenbang Kelurahan, dan sekarang saya sudah menyiapkan usulan itu, tinggal diserahkan ke Pak Lurah" (Wawancara tanggal 9 Pebruari 2013).

Undangan yang hadir pada forum Musrenbang Kelurahan Nunukan Tengah juga ada ketua RT yang baru menjabat, tetapi kebanyakan yang hadir adalah mereka yang sudah biasa mengikuti rapat Musrenbang di Kelurahan karena memang selama ini undangan pertemuan Musrenbang adalah tokoh masyarakat dan Ketua RT dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Pengurus LPM. Demikian juga yang diutarakan oleh salah seorang ketua RT yang baru, berikut ini :

> " .....karena pak Lurah sudah menyampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu saat kami berkumpul di Kantor ini, maka saya menyiapkan bahan usulan, seperti biasa usulan tidak banyak-banyak, karena belum tentu disetujui, apalagi sekarang banyak pekerjaan PL yang tidak ada di usulkan warga" (wawancara tanggal 13 Pebruari 2013).

Ada lagi komentar dari tokoh masyarakat menyikapi undangan Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kelurahan, sebagai berikut :

> " .....acara Musrenbang ini bagus saja dilaksanakan, biar kita bisa ketemu dengan warga, dan mendengarkan apa yang akan dilaksanakan pembangunan di wilayah Nunukan Utara, Pak Lurah sudah mengundang kita, jadi kita mesti hadir kalau ada kesempatan ..... " (wawancara 13 Pebruari 2013).

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa para undangan bahwa forum Musrenbang Kelurahan ini telah menyiapkan usulan sesuai informasi awal dari Lurah Nunuan Utara, tetapi mereka juga tidak lagi mengusulkan terlalu banyak karena ternyata lain yang diusulkan lagi yang dikerjakan, seperti pekerjaan PL (Penunjukan Langsung) yang tidak pernah diusulkan, karena memang pekerjaan yang dikerjakan tersebut belum menjadi prioritas bagi warga, PL tersebut hanya oknum yang ingin mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut, sehingga pak RT tidak terlalu bersemangat untuk mempersiapkan usulan-usulan untuk Musrenbang Kelurahan. Acara pertemuan Musrenbang Kelurahan Nunukan Utara diselenggarakan selama sehari dari jam 09.00 – 12.00 wite.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Pak Lurah telah menyampaikan kepada ketua RT agar sebelum dilakukan Musrenbang agar mereka melakukan pertemuan dengan warganya dahulu untuk mendapatkan usulan yang cocok diusulkan pada Musrenbang Kelurahan, walaupun pada kenyataan tidak semua yang melakukan hal tersebut, berkenaan dengan waktu dan mengumpulkan warga yang sulit, karena kebanyakan warga adakah pekerjaan yang sulit dikumpul.

Proses perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Utara dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Tahap persiapan, terdiri dari penyampaian undangan Musrenbang oleh Pak Lurah sebanyak 65 lembar ditujukan kepada warga untuk hadir sekaligus menyampaian usulan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu dalam pertemuan dengan warga. Ternyata tidak semua ketua RT yang melaksanakan amanat pak Lurah tersebut, mereka menganggap sudah memahami kebutuhan warganya. Lurah juga tidak membentuk Tim Fasilitatornya disebabkan ketiadaan pembiayaan dari pihak kelurahan.
2) Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :
   - Pembukaan dilakukan oleh H. Sahdan,S.E. selaku Lurah Nunukan Utara yang menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih Karena ternyata warga kelurahan nunukan utara masih antusias mengikuti musrenbang kelurahan. Selanjutkan sebelum rapat dimulai dilakukan terlebih dahulu pembacaan doa oleh H. Muhammade. Sebelum diskusi dimulai, lurah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

menyampaikan tentang tujuan Musrenbang dilakukan dan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.

- Rapat diawali oleh penjelasan dan pengarahan yang dilakukan oleh Kasi. PMD untuk membacakan dan mempresentasikan daftar usulan warga masing-masing RT kepada peserta rapat. Setelah selesai penjelasan dan pengarahan, kemudian lurah memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan tentang pelaksanaan musrenbang. Terdapat beberapa orang yang memberikan pertanyaan yaitu sebanyak 13 orang. Sedangkan yang memberikan komentar sebanyak 6 orang. Terhadap pertanyaan dan komentar yang perlu mendapat jawaban dilakukan oleh lurah, Kasi PMD, Staf Puskesmas, petugas dari Babinkamtibmas dan petugas dari Babinsa. Daftar usulan yang telah dikumpulkan oleh ketua RT selanjutnya dibacakan kembali untuk mementukan prioritas dan mendapat kesepakatan dari peserta rapat dan selanjutnya dibuatkan berita acara. Hasil tersebut selanjutnya nanti akan diserahkan kepada Camat. Pada rapat ini tidak ada penyusunan alokasi kegiatan yang diupayakan melalui program pembangunan PNPM, seluruh usulan warga dimasukan dalam usulan Musrenbang. Pada kesempatan ini tidak ada usulan yang dihapus dari daftar, sehingga usulan dari Kelurahan Nunukan Utara menjadi cukup banyak. Sejak rapat dimulai dilanjutkan mendengarkan pendapat dari peserta rapat bahkan hingga selesai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

rapat berjalan dengan lancar. Rapat ditutup oleh Lurah sekaligus menikmati makanan yang telah dihidangkan.

3) Keluaran

Berita acara kesepakatan terhadap usulan yang sudah disusun dalam musrenbang berdasarkan prioritas. Berita acara dan lampiran usulan kegiatan seterusnya akan diserahkan kepada pihak kecamatan nunukan.

4) Peserta

Peserta Musrenbang sesuai undangan dari Kelurahan Nunukan Utara yaitu sebanyak 57 orang yang terdiri dari Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat sebanyak 9 orang, organisasi wanita sebanyak 4 orang, Pengurus LPM sebanyak 2 orang, ketua RT sebanyak 11 orang, Koramil sebanyak 1 orang, Polsek sebanyak 1 orang, Puskesmas Nunukan sebanyak 1 orang, pengurus PNPM sebanyak 7 orang, dan Petugas Penyuluh Lapang sebanyak 3 orang serta pegawai kelurahan sebanyak 6 orang.

5) Narasumber

Lurah Nunukan Utara.

e. Musrenbang Desa Binusan.

Desa Binusan menyelenggarakan Musrenbang desa pada tanggal 28 Januari 2013, yang dihadiri 34 orang terdiri dari para Ketua RT, tokoh masyarakat , masyarakat dan pengurus BPD. Para undangan Musrenbang Desa Binusan yang hadir khususnya para ketua RT membawa serta usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

Musrenbang Desa. Para ketua RT baru menyiapkan usulan tersebut setelah menerima undangan menghadiri Musrenbang dari kepala Desa, Seperti yang diutarakan oleh salah seorang ketua RT berikut ini :

> "... setelah saya menerima undangan dari kades bahwa akan dilaksanakan Musrenbang desa, saya menyiapkan usulan dari RT saya, kebetulan data itu sudah ada tinggal diserahkan kepada kepala desa." (Wawancara tanggal 21 Pebruari 2013).

Berbeda dengan komentar dari ketua RT yang lain, yang menyampaikan komentar sebagai berikut :

> "... ketika menerima surat undangan dari kepala desa, lalu saya mendatangi beberapa warga untuk membuat usulan yang dibutuhkan warga, kami tidak mengusulkan terlalu banyak, hanya 3 kegiatan saja, itu sudah cukup, syukur bisa masuk, nanti juga yang dikerjakan justru usulan yang lain " (Wawancara tanggal 21 Pebruari 2013).

Undangan yang hadir pada forum Musrenbang Desa para ketua RT yang sudah sering menghadiri acara Musrenbang desa, memang ada beberapa warga yang mewakili ketua RT, karena ada beberapa ketua RT yang berprofesi sebagai nelayan, yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan di laut.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang peserta rapat, berikut ini :

> " saya baru kali ini ikut acara Musrenbang, saya hanya mewakili ketua RT saya, saat ini dia tidak bisa hadir karena harus ke laut, jadi saya datang untuk mendengarkan saja, nanti baru saya lapor pada ketua RT" (wawancara tanggal 21 Pebruari 2013).

Ada lagi komentar dari tokoh masyarakat menyikapi undangan Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang Desa, sebagai berikut :

> "Musrenbang sudah sering saya ikuti, saya perhatikan kita hanya menyampaikan usulan, tapi pemda kurang mau menerima usulan kita, masih ada sama warga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

> usulan yang sudah bertahun-tahun sampai sekarang tidak ada realisasi " (wawancara tanggal 21 Pebruari 2013).

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa para undangan bahwa forum Musrenbang desa datang untuk menyampaikan usulan kepada kepala desa, namun ada juga karena ketua RT mereka tidak dapat hadir, maka mereka yang mewakili, tetapi ada juga yang undangan yang menganggap Musrenbang hanya kumpul usulan saja, tapi tidak ada realisasinya.

Pihak Kelurahan tidak mengundang pihak-pihak lain diluar RT, BPM dan tokoh masyarakat, dengan alasan bahwa Pak RT, BPM, Tokoh masyarakat sudah tahu persoalan serta karena pembiayaan yang terbatas. Proses pelaksanaan Musrenbang Desa diselenggarakan selama sehari dari jam 09.00 – 11.30 wite.

Proses perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Binusan dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Tahap persiapan, terdiri dari penyampaian undangan kepala desa sebanyak 57 lembar yang ditujukan kepada ketua RT, pengurus BPM, masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menghadiri undangan Kepala Desa Binusan yaitu berupa acara Musrenbang. Kepala Desa tidak membentuk Tim fasilitator yang anggap merepotkan dan tidak perlu karena RT sudah tahu kebutuhan warganya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

2) Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :

- Pembukaan oleh Kepala Desa Binusan Bapak Untung, yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga, dan juga baru pertama kali memimpin rapat ini karena baru terpilih menjadi kepala desa Binusan.
- Rapat selanjutnya dipimpin oleh kepala desa melalui mekanisme penyampaian usulan yang sudah disiapkan oleh ketua RT atau yang mewakili serta pengajuan tambahan usulan dari tokoh masyarakat dan pengurus BPM jika ada usulan baru yang hendak dimasukan dalam Musrenbang Desa. Dalam rapat ini kepala desa bertanya kepada beberapa ketua RT mengapa mengajukan usulan yang dianggap belum perlu namun diajukan di musrenbang desa, cukup dengan swadaya masyarakat saja. Beberapa orang yang mengajukan pertanyaan atau komentar yaitu sebanyak 4 orang, yang memberikan tanggapan sebanyak 3 orang. Adapun pihak yang memberikan jawaban atau tanggapan yaitu Kepala Desa, aparat desa. Daftar usulan yang dibahas di musrenbang desa Binusan kemudian disusun oleh aparat desa untuk dijadikan sebuah dokumen yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kecamatan saat Musrenbang Kecamatan. Tidak dilakukan pembahasan mengenai kegiatan yang sebaiknya dialokasi melalui program PNPM pedesaan, sehingga semua usulan ketua RT dan dari peserta rapat di jadikan usulan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akan di bawa dalam Musrenbang Kecamatan. Rapat ditutup oleh Kepala Desa dan diakhiri dengan makan bersama.

3) Keluaran

Daftar usulan yang sudah disusun oleh aparat Desa berdasarkan daftar yang dibuat oleh ketua RT, dan peserta rapat.

4) Peserta

Peserta Musrenbang Desa Binusan yaitu sebanyak 34 orang yaitu Ketua RT, pengurus BPM, masyarakat dan tokoh masyarakat.

5) Narasumber

Kepala Desa Binusan.

f. Musrenbang Kecamatan Nunukan.

Musrenbang Kecamatan Nunukan tahun 2013 adalah forum musyawarah tahunan *stakeholder* Kecamatan Nunukan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada tahun 2014.

Kecamatan Nunukan menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan pada tanggal 12 Pebruari 2013, yang dihadiri 193 orang terdiri dari Ketua RT, masyarakat, organisasi wanita, LSM, SKPD, anggota DPRD, UPTD, instansi vertikal dan aparat kecamatan. Usulan yang akan dibahas di Musrenbang Kecamatan sudah diserahkan beberapa hari sebelum Musrenbang dilaksanakan, sebagai pedoman bagi para peserta dalam pembahasan usulan dari tingkat Kelurahan/desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam forum Musrenbang itu tidak ada diskusi penentuan prioritas usulan. Penentuan prioritas diserahkan kepada pihak Kelurahan yang menyusun mulai dari prioritas 1,2, dan 3 ditambah usulan dari peserta rapat yang diberi kesempatan oleh Camat untuk memberikan masukan jika dipandang perlu sebagai tambahan usulan.

Berkaitan dengan usulan lewat proposal yang banyak beredar, maka Camat menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

> " untuk mereka yang mengajukan usulan lewat proposal , maka diharapkan agar sebaiknya usulan tersebut disampaikan lewat jalur Musrenbang saja, Karena sangat mengganggu sistem Musrenbang sebagai forum resmi pemerintah, dan itu juga yang membuat warga malas untuk menghadiri Musrenbang karena usulan mereka belum terealisasi, tapi yang dikerjakan diwilayah mereka justru hasil dari proposal dan reses DPRD" (Wawancara tanggal 21 Mei 2013)

Ada lagi komentar dari tokoh masyarakat menyikapi undangan Camat Nunukan untuk menghadiri Musrenbang Kelurahan ini, sebagai berikut :

> "……rasanya saya malas menghadiri acara ini, bagusnya usulan yang selama ini tidak ditanggapi pemda, itu saja yang diajukan kembali, atau bagusnya kita mengajukan usulan lewat proposal saja, tidak perlu lewat Musrenbang…… " (wawancara 21 Pebruari 2013).

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa para undangan pada forum Musrenbang Kecamatan ini hanya menghadiri untuk menghargai undangan Camat, apalagi para peserta ini mendapat uang transport, walaupun sebenarnya mereka tidak terlalu bersemangat untuk menyampaikan usulan tambahan.

Proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah ini diselenggarakan selama sehari dari jam 09.00 – 13.00 wite. Dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

lebih banyak mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, dan mendengarkan masukan peserta rapat dan beberapa penjelasan dari pihak SKPD dan DPRD Kabupaten Nunukan. Pada pertemuan ini diskusi penyusunan prioritas usulan tidak ada, sepenuhnya dilakukan oleh aparat Kelurahan yang dipercaya untuk menyerahkan usulan tersebut setelah Musrenbang selesai.

Proses perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Nunukan Tengah dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Tahap persiapan, terdiri dari penyampaian undangan menghadiri Musrenbang Kecamatan sebanyak 200 lembar yang ditujukan kepada pihak Kelurahan, Pengurus PKK, Tokoh Masyarakat, Pengurus LPM, masyarakat, LSM, instansi vertikal, Anggota DPRD serta SKPD. Pada tahap ini pihak-pihak yang belum menyampaikan usulan lewat Musrenbang Kelurahan dipersilahkan menyampaikan usulan tambahan jika dianggap usulan yang disampaikan oleh Kelurahan dianggap masih kurang, atau ada hal yang penting yang harus segera dikerjakan.
2) Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :
   - Pembukaan oleh Camat Nunukan, Umboro Hadisusino,S.E. yang memberikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, juga memberikan apresiasi karena walapun musrenbang dianggap kurang berfungsi dengan baik, tetapi masih banyak warga yang berharap musrenbang menjadi saluran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bagi harapan masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat banyak.

- Pemaparan oleh Camat Nunukan berupa proses penyusun daftar usulan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan mekanisme yang sudah dibuat ditingkat kelurahan/desa sehingga menghasilkan daftar usulan yang sekarang akan dibahas di musrenbang kecamatan. Selanjutnya pemaparan Bappeda Kab. Nunukan oleh Rohadiansyah,S.Hut mengenai mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan serta beberapa pandangan mengenai aspirasi masyarakat dan arti pentingnya musrenbang dari Anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yaitu Bapak Ruman Tumbo,S.H.
- Rapat dimulai dengan penjelasan Camat mengenai mekanisme rapat dan selanjutnya mendengarkan penyampaian usulan yang penting oleh kelurahan/desa dan selanjutnya ditanggapi oleh SKPD. Para undangan juga memberikan tanggapan dan pendapat yaitu sebanyak 10 orang, sedangkan yang memberikan penjelasan dan jawaban atas pertanyaan peserta yaitu Camat Nunukan, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, dan Bappeda Kabupaten Nunukan. Pendapat para peserta rapat lebih banyak mempersoalkan kegiatan pembangunan di Kecamatan Nunukan yang sudah berjalan namun tidak sesuai dengan usulan warga. Para undangan juga mempersoalkan usulan yang sudah bertahun-tahun namun tidak pernah terealisasi. Rapat juga

UNIVERSITAS TERBUKA

41596.pdf

menjadi tempat menyampaikan keluhan terhadap proyek yang bersumber dari aspirasi DPRD. Proyek yang dikerjakan tersebut bukan merupakan kebutuhan warga dan tidak masuk dalam musrenbang, bahkan dikerjakan oleh pihak tertentu dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Camat juga berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Nunukan, agar dalam mengerjakan sesuatu yang merupakan aspirasi masyarakat sebaiknya disampaikan dahulu lewat musrenbang kecamatan. Hal ini dilakukan karena media penyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui musrenbang. Dalam pertemuan ini pembahasan tiap usulan setiap kelurahan dalam membuat skala prioritas tidak dilakukan, rapat hanya meminta tambahan usulan warga lalu dihimpun oleh aparat Kelurahan dan Kecamatan, dengan alasan tambahan usulan ini sebagai keterwakilan dari Tokoh Masyarakat, UPTD, LSM, Organisasi Wanita. Rapat ditutup oleh Camat Nunukan, dilanjutkan dengan makan bersama serta pemberikan uang transport dari panitia kecamatan kepada seluruh peserta rapat musrenbang kecamatan nunukan.

3) Keluaran

Daftar usulan prioritas 1,2,3 dari setiap kelurahan/desa ditambah usulan baru yang berkembang dalam rapat Musrenbang Kecamatan sebagai bahan untuk disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Nunukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Peserta

Peserta Musrenbang sesuai undangan yaitu sebanyak 193 orang belum termasuk aparat kecamatan. Adapun peserta yang hadir yaitu lurah dan kepala desa sebanyak 5 orang, Ketua RT sebanyak 52 orang, Tokoh masyarakat sebanyak 17 orang, organisasi wanita sebanyak 15 orang, masyarakat sebanyak 35 orang staf kelurahan 10 orang, instansi vertikal sebanyak 7 orang, anggota DPRD sebanyak 2 orang, SKPD sebanyak 50 orang ditambah staff dari kecamatan nunukan.

5) Narasumber

- Kabupaten : Bappeda Nunukan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan, perwakilan SKPD dari Kabupaten.
- Kecamatan : Camat Nunukan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Memperhatikan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan melalui tahapan perencanaan partisipatif berupa pelaksanaan Musrenbang ditingkat Desa, Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan, selanjutnya setiap proses perencanaan di setiap Musrenbang akan dikaji untuk melihat sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan telah dilaksanakan, dengan merujuk pada pendapat Wicaksono dan Sugiarto, yaitu terdapat 5 ciri perencanaan Partisipatif.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adapun Ciri-ciri perencanaan partisipatif tersebut adalah :

a) Fokus Pada Kepentingan masyarakat, Bahwa proses perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat serta dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

b) Partisipatoris, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikian tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

c) Sinergitas Perencanaan, penekanan lebih diarahkan pada kerja sama antar wilayah administrasi dan geografis serta dengan memperhatikan interaksi diantara stakeholder.

d) Legalitas Perencanaan, bahwa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada semua peraturan yang berlaku dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

e) Fisiblitas (Realistis), yang mana perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan dan mempertimbangan waktu.

a. Fokus pada Kepentingan Masyarakat.

Perencanaan partisipatif adalah didasarkan pada kepentingan masyarakat terhadap masalah dan kebutuhan yang dihadapinya. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui suatu penyelidikan, yaitu suatu proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat. Penyelidikan dalam konteks perencanaan pembangunan di suatu daerah idealnya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Suatu penyelidikan dalam suatu wilayah,dapat dimulai dari tingkat RT melalui mekanisme ketua RT dibantu oleh warganya melalui penggalian dan pengumpulan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat. Namun perlu juga dilakukan *review* terhadap masalah dan kebutuhan dengan menentukan kriteria yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran dan validasi secara menyeluruh, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan Musrenbang di tingkat Kelurahan.

Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut adalah :

1) Merupakan kebutuhan mendasar.
2) Masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak.
3) Dirasakan oleh sebagian warga masyarakat.
4) Tersedia potensi dan sumber daya.

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan seleksi masalah dan kebutuhan dilakukan dalam suatu rapat yang dipimpin oleh ketua RT, yang tentu diharapkan dapat dihadiri oleh banyak warga. Namun pelaksanaan kegiatan penyelidikan di RT dalam lingkungan Kecamatan Nunukan tidak dilakukan oleh semua ketua RT, serta dengan pola dan metode yang berbeda pula.

Ternyata tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan dalam bentuk rapat atau pertemuan yang pernah dilakukan dengan ketua RT umumnya rendah, sehingga ini juga yang membuat banyak ketua

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41596.pdf

RT tidak pernah mengadakan pertemuan dengan warganya, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga kelurahan Nunukan Tengah inisial AS, adalah sebagai berikut :

> "…..tidak pernah pak RT mengundang warganya untuk membahas permasalahan kampung, apalagi kerjaan yang mau diusulkan dalam rapat di kelurahan. Kalau ada sebenarnya lebih bagus, kita bisa nyumbang sarang. " (Wawancara tanggal 21 Mei 2013).

Komentar juga datang dari tokoh masyarakat inisial SS, sebagai berikut :

> " ……apa memang masih perlu buat rapat seperti itu, memang bagus itu yang prioritas bisa diusulkan dan pasti berguna untuk kita kalau dikerjakan dikampung sini, tapi kenyataannya usulan yang cape-cape dibuat tapi yang masuk justru yang tidak pernah diusulkan, hanya sedikit saja usulan yang dikerjakan……" (wawancara 21 mei 2013)

Dari tiga penyataan diatas dapat diinterpretasikan bahwa para Ketua RT lebih senang menyusun sendiri usulan yang nanti diusulkan dalam pertemuan dimusrenbang kelurahan, karena menurut para Ketua RT usulan itu sudah mereka tahu saat mereka jalan-jalan, atau ketika bertemu dengan warga ketika ada acara dirumah salah seorang warga. Mereka juga tidak ingin warganya kecewa karena usulan sangat sedikit yang diakomodir Pemerintah Kabupaten Nunukan, seperti yang disampaikan oleh ketua RT 15 Nunukan Tengah :

> " Wah ngak usalah buat pertemuan, biayanya siapa yang nanggung, untuk usulan itu saya sudah sering ketemu warga, melihat-lihat keadaan RT saya ini. Kalau pertemuan dimana saja, kalau ada acara dirumah wargapun mereka sering bercerita masalah mereka, itulah yang saya usulkan ketika diminta oleh pihak kelurahan……." (wawancara 21 mei 2013)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Demikian juga pendapat dari Ketua RT 9 Nunukan Utara, sebagai berikut :

> " Apa sekarang ini perlu mengumpulkan warga untuk rapat, biarlah saya yang membuat, kasian juga warga kalau diajak rapat, toh nanti proyek yang masuk banyak yang bukan usulan mereka..." (wawancara 21 mei 2013)

Apapun situasinya dalam sebuah perencanaan, proses keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci, karena dari usaha mengumpulkan warga di lingkungan RT akan diperoleh banyak masukan dan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal termasuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah berdasarkan pembobotan dan kriteria masalah dan kebutuhan.

Untuk hal proses penyusunan dengan melibatkan masyarakat, salah satu anggota DPRD Komisi I, Bpk. AT,S.H. menjelaskan setelah memperhatikan beberapa usulan masyarakat ketika Musrenbang Kecamatan, berikut petikannya :

> " Usulan yang dibuat oleh Ketua RT, lalu disetujui oleh Kelurahan serta dimasukan dalam usulan Musrenbang Kecamatan, saya perhatikan ternyata masih ada beberapa usulan dari pihak-pihak tertentu, itu bisa dilihat dari lokasi yang diusulkan. Inilah mungkin resikonya kalau kepercayaan penuh diserahkan kepada Ketua RT atau Tokoh Masyarakat." (wawancara tanggal 20 Mei 2013)

Dari hasil pengamatan di lapangan terhadap usulan dari ketua RT yang telah masuk ke kelurahan, ternyata masih banyak ditemukan usulan-usulan yang jika ditinjau dari kriteria dalam penentuan prioritas berdasarkan masalah dan kebutuhan, didapati usulan yang belum

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan masalah dan kebutuhan prioritas warga yang harus mendapat perhatian pemerintah, usulan tersebut masih bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat local atau di usulkan melalui program PNPM. Usulan tersebut jika diamati dan setelah dilakukan tinjauan di lapangan ternyata berasal dari ketua RT sendiri yang mengusulkan pembangunan drainase yang berada di dekat pemukimannya. Ketika hal ini dikonfirmasi, jawaban yang diperoleh dari salah seorang Tokoh pemuda warga RT 20 Nunukan Barat, yaitu :

> " masalah itu kami kurang mengerti, karena pak RT yang membuatnya, kami tidak pernah dikonfirmasi apalagi dikumpul untuk rapat, nanti kalau ternyata dikerjakan sama DPU, kami akan protes....." (wawancara 21 mei 2013)

Dalam fokus perencanaan yang dilakukan oleh para ketua RT di Kecamatan Nunukan, masyarakat tidak sepenuhnya diajak untuk penyelidikan terhadap usulan yang bakal di sampaikan dalam Musrenbang Kelurahan.

Berdasarkan penyampaian kepala seksi Sosbud dan Kesra,di Kelurahan Nunukan Timur ternyata sebagai besar ketua RT belum dapat melakukan kegiatan penyelidikan, hal ini disebabkan keterbatasan aparat kelurahan yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan kepada ketua RT, padahal masih ada ketua RT yang sebenarnya mau melaksanakan kegiatan penyelidikan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua RT 16, ibu AS, sebagai berikut :

> "..... saya hanya ditelepon ibu dari kelurahan, seandainya saya tahu bahwa sebelum diadakan Musrenbang Kelurahan, semua RT harus melakukan kegiatan musyawarah dengan warganya untuk membuat usulan mana yang prioritas, pasti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

saya akan buat, kan itu bagus biar warga tidak protes ke saya..... " (wawancara 21 mei 2013).

Hal lain adalah adanya keengganan para ketua RT melaksanakan penyelidikan karena tidak mengerti mekanisme penyusunan prioritas dan identifikasi masalah dan kebutuhan serta penyusunan skoring, sehingga informasi tentang masalah dan kebutuhan yang diusulkan melalui kegiatan di lingkungan RT umumnya merupakan masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan penilaian para ketua RT. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ketua RT inisial DT, sebagai berikut :

"..... tidak usahlah, saya juga tahu permasalahan dan kebutuhan apa perlu diusulkan masyarakat, dan mana yang tidak..... nanti juga masih dirapatkan di Kelurahan apakah usulan itu bisa masuk atau tidak...." (wawancara 21 Mei 2013).

Atau komentar yang disampaikan oleh salah seorang ketua RT, inisial DM, sebagai berikut :

" kami belum mengerti mekanisme penyusunan usulan yang prioritas, apalagi kami adalah ketua RT yang baru, selama ini kami belum pernah mendapat informasi dan pengarahan dari kelurahan, lalu juga tidak ada formulir yang diisi, sehingga kami mencari jalan yang mudah dengan menyusun sendiri, toh kami mengerti kok kondisi lingkungan RT saya, rata-rata ketua RT juga menyusun seperti yang saya buat.... " (wawancara 21 Mei 2013).

Ada juga komentar dari salah seorang ketua RT, berinisial AA, sebagai berikut :

" tidak perlu melakukan rapat penyelidikan, cukup bertemu dengan warga, lalu berbicara keluhan mereka, kemudian saya catat, karna juga kadang sia-sia saja kita menyusun menghabiskan waktu. Usulan yang tahun kemarin saja belum ditindaklanjuti, banyak yang tidak dikerjakan oleh pemerintah" (wawancara 21 Mei 2013).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas memperlihatkan bahwa masalah dan kebutuhan yang diusulkan ditingkat RT tidak seluruhnya berasal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan di tingkat RT. Selain itu juga memang aparat kelurahan tidak pernah lagi melakukan pembinaan dan sosialisasi bagaimana melakukan kegiatan penyelidikan di tingkat RT, sehingga ketua RT yang rata-rata berusia diatas 50 tahun dan banyak yang baru menjabat sebagai ketua RT tidak mengerti dan menyusun pola kerja penyusunan usulan di tingkat RT. Tidak semua RT dalam satu kelurahan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dengan alasan tertentu, yakni sebelum masalah dana kebutuhan yang diusulkan tahun kemarin ditindaklanjuti, maka pihak RT tidak akan mengajukan usulan baru, apalagi melaksanakan rapat untuk penggalian masalah dan kebutuhan di tahun berikutnya.

Keterbatasan pemahaman masyarakat dihampir semua Kelurahan dan Desa di Kecamatan Nunukan diakui oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Nunukan, inisial RS, berikut pernyataannya:

> " .....Sulit memang mengumpulkan masyarakat untuk membahas masalah dan kebutuhan pembangunan di Kelurahan khususnya ditingkat RT, mereka banyak yang tidak mengerti tujuan dari kegiatan ini. Perlu diberikan pemahaman tujuan perencanaan partisipatif yaitu secara bersama-sama merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk mmbangun RT dan kelurahan di wilayah mereka. Harus dipahami bahwa merencanakan pembangunan itu tugas pemerintah dan masyarakat, sehingga aparat di Kelurahan dan Kecamatan harus turut membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat" (wawancara 21 Mei 2013).

Perlunya melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat juga dibenarkan oleh Camat Nunukan inisial UH, yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengemukakan bahwa bagaimana mengetahui kebutuhan masyarakat adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Karena perencanaan partisipatif tidak sekedar didasarkan pada "daftar keinginan" pihak tertentu, melainkan benar-benar berasal dari kebutuhan nyata seluruh masyarakat melalui penilaian setiap usulan.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan juga meminta kepada Pemerintah daerah, melalui Bappeda melakukan pemberdayaan dan pembinaan metode identifikasi masalah dan kebutuhan agar diperoleh usulan yang berbobot, karena selama ini seluruh Ketua RT tidak mengerti, apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, yang dilakukan adalah mereka hanya menilai sebuah kondisi berdasarkan penilaian pribadi. Seperti pendapat anggota DPRD :

> " Berdayakanlah setiap RT agar lebih proaktif ke masyarakatnya dalam mencari/menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk diperjuangkan dalam musrenbang, dan tiap RT dapat memaparkan usulan dari warga mereka " (wawancara tanggal 18 Juni 2013)

Fenomena usulan dalam Musrenbang Kelurahan didominasi oleh kegiatan fisik hampir 90 % sedangkan non fisik hanya 10% sebagai mana yang nampak dalam daftar usulan seluruh kelurahan dan desa di Kecamatan Nunukan. Walaupun sebenarnya masyarakat juga ingin mengusulkan kegiatan yang bersifat non fisik. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga yang membutuhkan bantuan modal usaha di Kelurahan Nunukan Tengah, inisial DM dengan mengemukakan sebagai berikut :

> " kami ingin juga mengusulkan bantuan pinjaman untuk modal usaha, karena kami banyak pengusaha tempe sangat saat ini lagi kesulitan permodalan... kalau ada pinjaman dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah itu bisa membantu kami agar usaha ini bisa terus berjalan." (wawacara 21 mei 2103).

Sedangkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di Binusan yang disampaikan oleh salah seorang warga yang berinisal RA adalah sebagai berikut :

> " karena kami kebanyakan adalah nelayan, saat ini kami sangat membutuhkan alat tangkat, atau mesin kapal, karena sulit mencari ikan jika hanya ditepi pantai saja, sehingga saat ini kami harus berani kelaut yang lebih dalam jika tidak sulit bagi kami mendapat tangkapan ikan yang cukup. " (wawancara 21 Mei 2013).

Camat Nunukan menyadari bahwa harapan usulan dari kelurahan sudah merupakan daftar kebutuhan yang sangat prioritas namun jika dicermati ternyata masih banyak didominasi oleh usulan yang bersifat fisik atau pembangunan, berikut petikannya :

> " Saya yakin bahwa usulan yang sudah kita bahas dalam Musrenbang Kecamatan tentu merupakan usulan yang prioritas walau saya akui masih banyak usulan yang tidak masuk padahal itu juga penting, seperti usulan non fisik bagi kebutuhan masyarakat kaum miskin, kelompok PKK, kegiatan generasi muda dan lain-lain, lalu masuk ke Musrenbang Kecamatan untuk dipilih mana yang prioritas dari setiap kelurahan, mungkin ada pihak yang kecewa ketika usulannya tidak terakomodir dalam prioritas Kecamatan, tapi kita harus berlapang dada karena tidak mungkin semua disetujui, apalagi dana Pemda sekarang tentu tidak sama dengan tahun sekarang ketika masih bergabung dengan Kaltim" (wawancara 21 Mei 2013).

Berkenaan dengan usulan yang disampaikan oleh Pihak Kelurahan pada Musrenbang Kecamatan, setelah dikonfirmasi dengan masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang memang belum pernah terlibat dalam pertemuan membahas usulan dari RT, mereka mengemukakan bahwa pertemuan baru dilaksanakan setelah ada kejadian di lingkungan RT, seperti pencurian, perkelahian, kebakaran,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pihak RT baru bertemu warga, tetapi kalau khusus membahas masalah dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan belum pernah ada undangan seperti itu.

Pandangan lain juga disampaikan oleh banyak ketua RT dan Tokoh masyarakat yang tidak lagi melaksanakan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat lewat pertemuan membahas khusus pembangunan didaerahnya, mereka cenderung lebih apatis dalam menyampaikan usulan, hanya usulan lama yang tidak terealisasi atau persoalan yang dianggap ketua RT sangat penting itu yang diusulkan lewat Musrenbang Kelurahan, Persoalan ini terjadi karena sudah banyak terjadi kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan lebih didominasi oleh kegiatan yang didahului pembuatan proposal oleh pihak-pihak tertentu serta pekerjaan yang dilakukan oleh orang tertentu berdasarkan hasil reses anggota DPRD yang diakomodir pemerintah Daerah. Walaupun terhadap hasil reses ini anggota DPRD Komisi I, Bpk. AT,S.H. menjelaskan kalau hasil resis tersebut juga merupakan aspirasi masyarakat dimana dilaksanakan reses tersebut.

Bahwa berdasarkan analisis data dengan membandingkan teori yang digunakan, pada tahap penyelidikan dimana pada fokus perencanaan dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Nunukan tidak dapat diketahui secara baik karena tidak adanya pertemuan penyelidikan, usulan lebih banyak dibuat oleh Ketua RT serta tidak mengertinya Ketua RT dalam membuat mekanisme penyusunan usulan akibat tidak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adanya sosialisasi dari aparat kelurahan dan Bappeda Kabupaten Nunukan ditambah anggaran yang tidak ada untuk hal-hal seperti itu, hanya inisiatif Ketua RT saja jika mau melaksanakannya, maka banyak kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang bukan merupakan hasil kajian masalah dan kebutuhan masyarakat serta banyak usulan kegiatan yang tidak berasal dari aspirasi warga tetapi usulan dari Ketua RT atau Tokoh Masyarakat.

b. Partisipatoris.

Partisipatoris merupakan keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan baik di Musrenbang desa/Kelurahan maupun Kecamatan dimana setiap warga memperoleh kesempatan berbicara yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran.

SKPD yang menyelenggarakan forum Musrenbang adalah SKPD Kelurahan dan SKPD Kecamatan Nunukan. Pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan ini dilakukan penjaringan aspirasi yang sudah dihimpun dari usulan prioritas setiap kelurahan dan Desa dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Namun dalam kenyataannya Musrenbang yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan Nunukan ini belum optimal dilakukan, hal ini dapat diperhatikan dari keikutsertaan komponen masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Komponen Masyarakat yang diundang belum mewakili seluruh unsur masyarakat di desa dan kelurahan, seperti yang disampaikan oleh Lurah Nunukan Utara, sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

> " yang saya undang hanya ketua RT dan Tokoh Masyarakat, karena selain masalah dana khusus Musrenbang Kelurahan ini tidak ada, saya anggap ketua RT dan tokoh masyarakat sudah tahu usulan masyarakatnya" (wawancara 21 Mei 2013).

Demikian juga yang dilakukan oleh Camat Nunukan dalam menghadirkan semua unsur masyarakat Kecamata Nunukan. Seperti yang disampaikan oleh Camat Nunukan, berinisial UH, sebagai berikut :

> " Bahwa peserta yang diundang dalam Musrenbang adalah para Lurah dan Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Nunukan, ketua PKK, Tokoh Masyarakat, pengurus LPMD, Bappeda, anggota DPRD, dan beberapa SKPD, saya anggap itu semua sudah mewakili semua unsur dalam masyarakat" (wawancara 21 Mei 2013).

Forum yang melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan pada tingkatan desa/Kelurahan hingga Kecamatan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran masih sangat minim, hal ini disebabkan waktu yang disediakan pada forum Musrenbang ini sangat singkat yaitu hanya lebih kurang 4 jam pada setiap SKPD, termasuk pemaparan dari kepala Desa/ Lurah dan Camat serta pemaparan dari pihak yang diundang. Sehingga kesempatan untuk diskusi dalam menyusun dan membahas setiap usulan menjadi sangat singkat, sehingga yang terjadi kelurahan dan Kecamatan tidak lagi meminta masukan, pendapat dan melakukan pembahasan secara khusus dalam sebuah kelompok diskusi membicarakan usulan yang sudah ada, malahan aparat desa/kelurahan dan Kecamatan meminta kepada undangan untuk memasukan usulan tambahan sehingga membuat daftar panjang usulan masyarakat. Waktu yang tersedia untuk diskusi akhirnya habis hanya untuk mendengarkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penyampaian ulang usulan dari setiap RT, menjadi ajang kritikan kepada Pemerintah daerah karena usulan yang lama hingga saat ini tidak terealisasikan.

Padahal forum Musrenbang desa/Kelurahan yang dihadiri Ketua RT, Tokoh masyarakat dan Pengurus LPM , Pengurus BPM menjadi ajang untuk memberikan kesempatan kepada para undangan untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap usulan yang sudah ada sebagai bahan penyusunan urutan prioritas.

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah seorang Lurah Nunukan Utara bahwa penggalian aspirasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat tidak sempat dilakukan, karena waktu yang singkat, berikut petikannya :

> "……Memang kalau diperhatikan usulan dari semua RT perlu dilakukan diskusi dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menanggapi dan memberikan pendapat terhadap usulan tersebut, waktu rapat yang tidak lama karena memang kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk makan siang, sehingga diskusi saya tiadakan " (wawancara 21 Mei 2013).

Lain lagi halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sosbud dan Kesra Kelurahan Nunukan Timur, berpendapat bahwa :

> " memang kalau Musrenbang Kelurahan, sepatutnya bisa dijadikan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, agar keterlibatan dalam perencanaan pembangunan dapat secara maksimal. Tapi kami maklum bahwa kami tidak memiliki dana yang cukup, pelaksanaan Musrenbang tersebut kami tidak sempat membuat Spanduk penyelenggaraan, karena dana yang sangat minim diambil dari kegiatan makan, minum pegawai " (wawancara 21 Mei 2013).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa binusan bahwa musrenbang Desa Binusan, keterwakilan kelompok masyarakat dari ketua RT dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengurus BPM memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, namun setelah dikonfirmasi dengan pengurus BPM ternyata diskusi dibatasi hanya pada beberapa orang saja, berhubung usulan sudah ditampung semua oleh aparat Desa, alasan lain pertimbangan waktu dan jarak kerumah yang memang saling berjauhan jika semua perwakilan berbicara.

Partisipasi masyarakat juga tenyata tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta yang hadir pada Musrenbang Kelurahan Nunukan Barat dan Kelurahan Nunukan Tengah. Pada Musrenbang Kelurahan Nunukan tengah, paparan dilakukan oleh Ibu Lurah mengenai pentingnya Musrenbang dan saran terhadap bentuk usulan yang akan disampaikan oleh peserta rapat dengan waktu lebih kurang 20 menit. Penyampaian seluruh usulan yang sudah masuk dan setelah dibacakan oleh beberapa ketua RT membutuhkan waktu 55 menit. Karena lama dalam penyampaian maka atas saran ibu Lurah seluruh usulan dikembalikan lagi kepada Ketua RT untuk disusun prioritas usulan. Usulan tersebut kemudian selesai rapat dikumpulkan kembali untuk dibuat daftar usulan bersama dengan usulan tambahan. Pada pertemuan ini tidak cukup waktu kesempatan untuk diskusi membahas usulan dan prioritas usulan. hanya beberapa pertanyaan dan komentar dari beberapa Ketua RT dan tokoh masyarakat terhadap proses musrenbang yang mereka anggap kurang aspiratif, dan ada beberapa tokoh masyarakat yang memberikan pendapat serta penjelasan namun menggunakan waktu yang lama. sedangkan beberapa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

peserta rapat tidak mendapat kesempatan untuk bertanya karena waktu terbatas yang hanya dibatasi selama 1 jam.

Pada kegiatan Musrenbang di Kelurahan Nunukan Barat, Musrenbang diisi dengan pengarahan Lurah Nunukan Barat dan diskusi namun tidak terlalu lama karena waktu pelaksanaan rapat yang hanya dua setengah jam saja. Hal ini karena rapat terlambat dimulai. Kesempatan bertanya dan memberikan tanggapan dilakukan hanya terhadap beberapa orang saja. Beberapa tokoh masyarakat dan ketua RT mengkritik pemerintah daerah karena beberapa usulan yang sudah lama tidak dilaksanakan, sehingga unek-unek mereka disampaikan pada forum ini dan penyampaian ini cukup menyita waktu untuk berdiskusi.

Pada musrenbang ini juga lurah meminta kepada para undangan agar menginformasikan kepada para pembuat proposal yang kegiatannya telah masuk di daftar usulan ketua RT agar membuat fotocopi proposal untuk diserahkan kepada Pihak Kelurahan. Diskusi lebih banyak membicarakan proposal hingga strategi bagaimana mendapatkan proyek tahun 2014. Diskusi yang penting dalam musrenbang ini untuk membahas kegiatan di setiap RT menjadi sedikit. Hal ini terlihat beberapa ketua RT dan tokoh masyarakat, peserta yang lain lebih banyak menyetujui saja.

Hasil pengamatan penulis terhadap Musrenbang Kecamatan Nunukan, waktu penyelenggaraan lebih banyak dihabiskan untuk mendengarkan paparan baik dari Camat, Bappeda, Unsur Kelompok UPTD, dan dari DPRD Kabupaten Nunukan. Sedangkan kesempatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berbicara dari undangan yang hadir hanya diberikan kepada Tokoh Masyarakat, instansi vertikal, SKPD dan organisasi wanita. Banyak pendapat dan tanggapan yang diberikan dari SKPD dan anggota DPRD menggunakan waktu yang lama, ditambah SKPD yang hadir ada 13 SKPD, dan ada 7 SKPD yang memberikan penjelasan terhadap usulan masyarakat. Beberapa warga yang diundang tidak mendapat kesempatan berbicara karena waktu yang terbatas sehingga banyak yang kecewa setelah Musrenbang selesai dilaksanakan.

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Desa Binusan, Kelurahan Nunukan Barat Kelurahan Nunukan Timur, Kelurahan Nunukan Tengah dan Kelurahan Nunukan Utara serta Kecamatan Nunukan diperoleh gambaran sebagai berikut ;

1) Kegiatan diskusi dalam kelompok melalui partisipasi masyarakat terhadap prioritas kebutuhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan belum dilaksanakan dengan baik, dengan alasan waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 3 jam, bahkan ada yang waktunya kurang dari 3 jam. Setiap desa/kelurahan melaksanakan mulai jam 9.00 – 12.00 wite, bahkan ada yang memulai jam 9.30 – 11.45 wite. Alasan lain minimnya dana pelaksanaan Musrenbang sehingga beberapa kelurahan tidak memasang spanduk pelaksanaan Musrenbang, bahkan ada yang hanya menyedia kue dan minum karena tidak mampu menyediakan makan siang, karena tidak tersedia anggaran. Hampir seluruh kelurahan undangan Musrenbang diberikan kepada

UNIVERSITAS TERBUKA

perwakilan dan mengupayakan tidak lewat makan siang, sehingga Ketua RT yang dipercaya membuat prioritas usulan ditambah usulan dari peserta rapat. Kondisi ini berakibat pada beberapa Ketua RT yang memiliki kepentingan sendiri dengan memprioritaskan usulan. Skala prioritas ini kelak ketika usulan tersebut dilaksanakan oleh dinas terkait maka lokasi berada di dekat pemukimannya bahkan ada ketua RT yang mengerjakan pekerjaan tersebut, dengan dalih ketua RT yang mengusulkan.

2) Ada kekhawatiran sebagian Ketua RT, jika usulan tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga, maka Ketua RT sulit melakukan lobi untuk mendapat pekerjaan itu nantinya. Hal ini terjadi di Kelurahan Nunukan Barat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang bersifat partisipatoris di seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan seperti Nunukan Barat, dan Kelurahan Nunukan Utara, Nunukan Timur, Nunukan Tengah dan Desa Binusan tidak dilaksanakan secara optimal karena penyusunan prioritas usulan diserahkan kepada ketua RT masing-masing atau kepada aparat Kelurahan untuk menghemat waktu dan pembiayaan dari Desa/Kelurahan terhadap kegiatan ini yang sangat terbatas. Masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, pengurus LPM atau unsur lain tidak diberi kesempatan banyak untuk mendiskusikan atau memberikan pandangan terhadap sebuah usulan, mereka juga tidak dilibatkan dalam penetapan daftar usulan proritas yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan dengan alasan waktu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

acara yang terbatas. Tokoh masyarakat dan Pengurus LPM hanya menambahkan usulan sebagai usulan baru.

Sedangkan pada Musrenbang Kecamatan Nunukan kesempatan untuk mendiskusikan sebuah usulan menjadi tidak ada, bahkan warga yang ingin memberikan pendapat dan saran tidak diberi kesempatan, dengan alasan waktu yang terbatas.

c. Sinergitas Perencanaan

Sinergitas perencanaan diperlukan ketika perencanaan pembangunan selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang, atau akan dibangun serta hasil interaksi diantara *stakeholder*.

Hasil wawancara terhadap para camat dan lurah serta kepala desa, terhadap usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrembang, kemudian menjadi RKPD pemerintah Kabupaten Nunukan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh SKPD ternyata persentase realisasinya masih cukup kecil yaitu realisasi usulan dari kecamatan Nunukan ± 30%, Kelurahan Nunukan Tengah ± 50 %, Kelurahan Nunukan Barat ± 50% ,Kelurahan Nunukan Utara ± 40% , Kelurahan Nunukan Timur sebesar ± 30%, Desa Binusan sebesar ± 20% .

Kegiatan pertemuan di tingkat Kelurahan berkaitan dengan pembangunan di setiap RT, sebenarnya tidak hanya melalui forum Musrenbang saja, tetapi forum-forum lain diluar Musrenbang. Program pemerintah melalui PNPM Perkotaan dan PNPM Pedesaan, maupun

UNIVERSITAS TERBUKA

program yang ditangani langsung oleh Kementrian/Lembaga bekerja sama dengan kelompok masyarakat atau SKPD di daerah, serta kegiatan APBD Provinsi Kalimantan timur. Program tersebut biasanya berupa bantuan kepada kelompok tani/nelayan, masyarakat miskin, UKM. Sehingga pertemuan ditingkat Desa/Kelurahan bukan hanya menghasilkan usulan untuk kegiatan Musrenbang Kecamatan, Tetapi juga mempersiapkan usulan untuk program pembiayaan di luar APBD Kabupaten Nunukan.

Seperti yang disampaikan Lurah Nunukan Tengah, sebagai berikut :

> " Dalam Musrenbang kelurahan, kami juga melakukan pemilahan yang dilakukan oleh aparat kelurahan dan RT, mana usulan yang diajukan ke Musrenbang Kecamatan dan usulan yang akan dimasukan dalam program PNPM Perkotaan, ini dilakukan supaya usulan tidak terlalu banyak, karena kalau lewat PNPM Perkotaan, usulan yang kecil-kecil, banyak yang direalisasikan, karena ini dikerjakan oleh masyarakat sendiri." (wawancara 21 Mei 2013).

Prioritas usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan Nunukan yang diharapkan bisa terakomodir oleh SKPD sebaiknya mempunyai kaitan dengan sinergitas, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang juga merupakan program yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau sesuai program kepala daerah yang dilaksanakan melalui penjabaran RPJMD setiap tahunnya.

Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh semua usulan yang masuk, kemudian dijadikan daftar prioritas usulan melalui pendanaan APBD Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nunukan, seperti yang disampaikan oleh Kasubag. Penyusunan Program Bappeda sebagai berikut :

> " Usulan yang baik dan bisa diteirma dalam sebuah program yaitu memiliki keterkaitan antar SKPD lainnya, misalnya usulan pembangunan jalan masuk menuju sekolah, keterkaitannya dengan SKPD lain yaitu jika jalan tersebut tidak dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, maka akan berpengaruh pada aksesibilitas anak sekolah yang akan menuju sekolahnya. Jadi disini ada keterkaitan antar DPU dan Dinas Pendidikan, usulan seperti ini yang dapat diakomodir..... " (wawancara 21 Mei 2013).

Demikian juga sinergitas terhadap keterkaitan dengan dokumen lainnya, seperti Dokumen Lingkungan, Rencana Induk dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang sosial Budaya, Bappeda Kab. Nunukan, sebagai Berikut :

> "Memudahkan usulan tersebut agar dapat diakomodir SKPD, sebaiknya usulan seperti pembangunan, kegiatan fisik lainnya sudah mendapat masukan dari SKPD berkenaan dengan Dokumen pendukung usulan tersebut. Susah jika usulan itu ternyata tidak didukung SKPD, karena mereka juga akan melaksanakan programnya dengan anggaran yang terbatas pula. " (wawancara 21 Mei 2013).

Sinergitas antar SKPD melalui usulan kecamatan merupakan salah satu kriteria berhasil atau tidaknya sebuah usulan yang bakal dikerjakan oleh SKPD. Atau sinergi antara ketersediaan sarana prasarana yang sudah dengan fasilitas pendukungnya. Selain itu diperlukan interaksi antar *stakeholder* dalam membahas kegiatan apa saja yang akan diusulkan pembiayaannya lewat APBD Provinsi Kalimantan Timur atau melalui APBN.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sinergitas perencanaan, Musrenbang Kecamatan Nunukan yang merupakan himpunan dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

prioritas kegiatan dari Musrenbang desa dan Kelurahan, ternyata masih banyak program prioritas yang diusulkan belum memenuhi kriteria sinergitas perencanaan. Hal ini nampak ketika dilakukan pembahasan di Musrenbang Kabupaten. Usulan yang disampaikan belum menunjukan sinkronisasi antar program SKPD dengan usulan Kecamatan yang merupakan daftar usulan Kelurahan. Masalahnya ini terjadi ketika Musrenbang Kelurahan, SKPD tidak hadir menyampaikan program prioritasnya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu terhadap usulan yang dikerjakan oleh pemerintah di desa dan kelurahan tenyata masih di bawah 50% dari keseluruhan usulan. Hal ini disebabkan program prioritas masih didominasi oleh usulan perorangan dalam hal ketua RT, tokoh masyarakat dan elit di desa/kelurahan dan kecamatan, sehingga banyak usulan dihilangkan karena belum masuk dalam program SKPD, dan justru program yang tidak diusulkan oleh Kecamatan yang dikerjakan. Kegiatan ini biasanya merupakan program dari SKPD yang telah memiliki Dokumen Perencanaan SKPD, kegiatan tersebut telah tertuang dalam rencana induk, usulan tersebut tidak masuk dalam kawasan yang harus mendapt persetujuan terlebih dahulu, seperti kegiatan dalam hutan lindung, kawasan KBK, atau Taman Nasional. Demikian juga terhadap program yang tertuang dalam Renstra atau program APBN atau APBD Provinsi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus, tuga Pembantuan maupun Bantuan Keuangan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Legalitas Perencanaan

Pengertian legalitas perencanaan adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Nunukan sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan maupun pada Musrenbang Kecamatan mengacu pada peraturan yang berlaku, walaupun secara teknis pelaksanaan belum secara optimal dilakukan.

Adapun peraturan yang menjadi acuan yaitu pertama pada tingkat Nasional adalah Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Ketiga Surat Edaran bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor : 008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang 2007.

Pemerintah Kabupaten Nunukan ternyata hingga saat ini tidak pernah menerbitkan mekanisme perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa daerah lain yang pelaksanaan Musrenbangnya diarahkan melalui mekanisme Musrenbang dan telah berjalan dengan baik. Sehingga mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan hanya merujuk pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Mendagri serta peraturan pemerintah lainnya.

Penyelenggaraan Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan pada pelaksanaan teknis Musrenbang banyak yang tidak sesuai surat Edaran bersama dan Permendagri tersebut. Hal ini disebabkan tidak pahamnya Kepala Desa, Lurah dan Camat berserta perangkatnya terhadap peraturan tersebut. Mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan pada tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Camat Nunukan, berikut ini :

> " Mekanisme yang saya tahun seperti tahun kemarin saja, saya belum terlalu banyak membaca peraturan mengenai teknis pelaksanaan Musrenbang, dan Bappeda juga tidak pernah mensosialisasikan teknis pelaksaan sehingga kami hanya berkreasi membuat mekanisme Musrenbang yang penting ada pemaparan dari SKPD, Bappeda, DPRD, Camat dihadiri undangan, sedangkan penyusunan prioritas usulan saya serahkan kepada lurah yang merumuskan, dan diberi kesempatan kepada tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi dan UPTD untuk menambahkan jika mau mengajukan tambahan usulan yang akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Seharusnya Bappeda juga memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan Musrenbang biar kami tahu alurnya." (wawancara 21 Mei 2013).

Demikian komentar dari Lurah Nunukan Barat,sebagai berikut :

> " Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ini kami laksanakan setelah ada surat dari Pak Camat Nunukan, kemudian kami mengundang seluruh ketua RT, Para Pemohon dan tokoh Masyarakat untuk hadir pada Musrenbang membawa usulan yang akan bicarakan di Kelurahan dan seterusnya dijadikan usulan ke Musrenbang Kecamatan, kalau di Musrenbang Kelurahan saya juga menjelaskan kalau usulan dari setiap RT merupakan permintaan masyarakat bukan usulan dari Ketua RT sendiri" (wawancara 21 Mei 2013).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah sesuai sumber hukum dalam suatu perencanaan pembangunan, namun dalam teknis pelaksanaan di Kabupaten Nunukan, Pemerintah daerah hingga saat ini belum menerbitkan mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan, sebagai panduan dalam proses perencanaan ditingkat RT/RW hingga pada Musrenbang Kabupaten Nunukan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan.

Hal lain yaitu walaupun Musrenbang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan namun pada mekanisme pelaksanaan masih terdapat kekurangan disebabkan para ketua RT,Lurah dan Camat belum memahami dengan benar mekanisme Musrenbang pada setiap tahapannya, permasalahan ini dapat dilihat dari :

1) Tidak seragamnya tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan, mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, keluaran, peserta, serta unsur pendukung lainnya.
2) Terdapat tahapan proses perencanaan yang tidak diselenggarakan di Kecamatan Nunukan.
3) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan.
4) Penetapan prioritas usulan belum melibatkan seluruh peserta musrenbang, tetapi diserahkan kepada ketua RT atau aparat Kelurahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil analisis kelayakan sebuah usulan Musrenbang Kecamatan, dapat diketahui :

1) Bahwa proses perencanaan partisipatif terhadap usulan yang dibuat sejak dari tingkat RT hingga masuk dalam Musrenbang Kecamatan, para pembuat usulan memahami fisibilitas kegiatan yang diusulkannya, mereka melihat pada kebutuhan dan yang bisa dikerjakan di wilayah mereka melalui pendanaan APBD Kab. Nunukan, Walaupun sebagaian besar merupakan usulan ketua RT dan Tokoh Masyarakat tanpa melibatkan masyarakatnya. Serta terdapat juga usulan yang layak diajukan namun tidak layak dikerjakan, karena ternyata lokasi yang usulkan tidak banyak pemukiman warganya, ada juga usulan yang diarahkan pada kepentingan beberapa warga saja tanpa memperhatikan penyebarannya di masyarakat.
2) Dalam menyusunan daftar prioritas usulan sebagian besar usulan tersebut tidak disertakan besar biaya yang dibutuhkan pada setiap kegiatan, hal ini karena keterbatasan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghitung jika usulan tersebut bersifat pembangunan.

Menjelaskan bagaimana Partisipasi masyarakat dilibatkan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat melalui pendapat Alexander Abe (2005), bahwa partisipasi masyarakat diperlukan agar perencanaan pembangunan benar-benar berbasis rakyat. Untuk mengukurnya harus memenuhi prinsip Transparan, responsif,

UNIVERSITAS TERBUKA

partisipatif dan akuntabel. Terhadap proses partisipatif dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan Nunukan perlu dilakukan pengkaji menggunakan prinsip-prinsip :

1) Transparansi. proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada tingkat RT tidak dibuka ruang bagi keterlibatan masyarakat secara langsung. Keputusan terhadap usulan yang akan diangkat ditingkat Desa/Kelurahan hanya diketahui oleh Ketua RT. Pendataan terhadap usulan hanya melalui pemantau ketua RT dan obrolan tidak resmi bersama tokoh masyarakat setempat. Secara langsung masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah dan mengusulkan kegiatan hingga memasuki Musrenbang Desa/Kelurahan dan ketingkat Musrenbang Kecamatan Nunukan. Masalah ini juga yang menjadi alasan mengapa anggota DPRD saat melakukan reses ke wilayah pemilihan masing-masing perlu untuk mencari masukan kegiatan yang akan diserahkan kepada Pemerintah, Anggota DPRD berpendapat bahwa Musrenbang itu tidak melibatkan warga langsung, hanya Ketua RT, Tokoh Masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh anggota DPRD Bpk. AT, S.H. :

> " Coba perhatikan yang hadir dalam Musrenbang hanya ketua RT dan tokoh masyarakat, bandingkan dengan ketika kami mengumpulkan warga saat reses, jauh lebih banyak, sehingga perlu bagi kami mendapat masukan usulan, karena tidak ada tempat menampung aspirasi mereka. Ketua RT sibuk membuat usulannya sendiri" (Wawancara 20 Mei 2013)

2) Responsif. Bahwa usulan program prioritas yang diharapkan disetujui oleh Pemerintah Daerah, ternyata banyak usulan bukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan upaya mengatasi masalah, kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat. Banyak usulan yang disampaikan dalam tingkat Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan merupakan rancangan dari pihak tertentu saja, dalam hal ini oleh Ketua RT dan Tokoh masyarakat, terbukti bahwa dalam undangan di Musrenbang Desa/Kelurahan hanya pihak tersebut yang diundang menghadiri dan sekaligus menambah dan mengurangi usulan.

3) Partisipatif. Dengan tidak melibatkan unsur-unsur lain seperti pengurus PKK, Tokoh pemuda, Masyarakat umum, tokoh agama, kelompok usaha masyakat dan unsur lain dalam Musrenbang desa/Kelurahan, maka ada sebagian masyarakat kurang mendukung terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Serta lebih bersifat pasif untuk memberikan masukan bagi kemajuan wilayahnya, mereka lebih mencari keuntungan finansial lewat pengajuan proposal yang didukung oleh DPRD Kabupaten Nunukan, agar bisa memperoleh proyek, walaupun proyek tersebut tidak memiliki manfaat luas bagi masyarakat.

4) Akuntabel. Dengan dilaksanakannya proses musrenbang Kecamatan Nunukan, yang mana masih banyak program prioritas usulan yang sebenarnya tidak dilakukan pembahasan secara dari tingkat RT/RW tetapi lebih merupakan usulan tambahan dari elit masyarakat, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabakan dan tidak mendapat legitimasi dari masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Mencermati langkah-langkah perencanaan partisipatif menurut Alexander Abe terhadap proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelidikan.

   Penyelidikan merupakan proses mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan masyarakat yang bersifat lokal. Agar diperoleh indormasi persoalan lokal yang harus di ketahui setiap ketua RT disetiap kelurahan/desa maka perlu mengajak masyarakat mengenai permasalahan dan kebutuhan di lingkungannya. Berkaitan dengan penyelidikan di lingkungan RT disampaikan oleh salah seorang ketua RT 16 nunukan tengah, ibu AS mengatakan :

   > " Memang bagus kalau ibu lurah menyampaikan kepada kami untuk mengajak masyarakat kita pertemuan membahas usulan yang perlu untuk dibangun di RT ini, tapi karena informasi tidak ada, maka saya sendiri yang membuat usulan yang akan disampaikan ke musrenbang, saya tidak mengajak warga rapat, dan selama ini memang rapat untuk membahas usulan itu tidak pernah ada, hanya ketua RT saja yang buat usulan"

   Pendapat lain juga disampaikan oleh Lurah Nunukan Barat, HB ketika diminta konfirmasi mengenai keterlibatan warga ketika ketua RT menggali informasi untuk menyusun usulan ke musrenbang kelurahan Nunukan Barat.

   > " Saya memang tidak menginstruksikan kepada ketua RT untuk melakukan pertemuan dengan warga untuk menggali informasi dan pendapat bag usulan yang mau dibicarakan di musrenbang kelurahan. Saya menganggap pasti ketua RT tahu masalah dan apa saja yang akan diusulkan di musrenbang kelurahan, dan memang banyak usulan yang sesuai kebutuhan di RTnya. "

UNIVERSITAS TERBUKA

Dari penjelasan tersebut bahwa untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di kelurahan di kecamatan Nunukan belum dimulai dari tingkat RT. Masalah – masalah yang dikumpulkan oleh ketua RT tidak dilakukan bersama dengan warganya. Masyarakat tidak pernah diajak berdiskusi membicarakan masaah yang perlu segera ditangani yang selanjutnya diusulkan pada musrenbang kelurahan. Daftar usulan tersebut disusun sendiri oleh para ketua RT.

2. Perumusan Masalah

Tahap selanjutnya dari hasil penyelidikan yaitu mengolah data dan informasi melalui proses analisis atas informasi dan pengalaman masyarakat dengan tujuan diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menghimpun kondisi dan keperluan yang benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Pada kesempatan inilah merupakan kesempatan dengan masyarakat memilah usulan yang merupakan kebutuhan dan yang mana usulan yang sekedar keinginan yang kadar subjektifitas tinggi.

Berkenaan dengan perumusan masalah untuk mengetahui tingkat keperluan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan mengetahui proritas atau tidak, ternyata tidak dilaksanakan dalam Musrenbang Kelurahan/Desa. Pimpinan rapat baik lurah maupun kepala desa tidak mengarahkan untuk melakukan perumusan atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

identifikasi masalah. Pada saat musrenbang Kelurahan/Desa malah pimpinan rapat meminta usulan tambahan dari para undangan baik tokoh, masyarakat, tokoh agama, kader PKK, instansi Vertikal sehingga usulan dari ketua RT semakin bertambah banyak. Para aparat Kelurahan/Desa mencatat semua usulan karena pengusul mengatakan usulan ini penting diusulkan ke tingkat musrenbang Kecamatan.

Usulan dari setiap kelurahan/desa bukannya semakin sedikit tetapi malah semakin bertambah banyak dengan masuknya usulan pada saat rapat musrenbang. Seharusnya dilakukan identifikasi masalah untuk mengurangi usulan yang hanya mengakomodir kepentingan seseorang atau kelompok. Bukannya justru dengan mengakomodir usulan tambahan.

3. Identifikasi Daya Dukung.

Perlunya dilakukan identifiasi daya dukung agar usulan kepada pemerintah daerah dapat disusun dengan baik tidak bersifat asal-asalan sehingga oleh pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan kemungkinan dilaksanakan pada tahun 2014 banyak usulan ini benar-benar telah diperhitungkan dengan sangat baik dan merupakan prioritas yang mendapat dukungan dari masyarakat.

Terhadap daftar usulan musrenbang kelurahan/desa yang disampaikan kepada pihak kecamatan yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan dijelaskan bahwa sumber dana setiap

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kegiatan yang diusulkan banyak yang tidak memuat besar biaya yang dibutuhkan setiap kegiatan dan sumber pendanaan untuk melaksanaan kegiatan itu nantinya. Format pengisian yang diberikan oleh pihak Bappeda Kabupaten Nunukan tidak seluruhnya diisi. Kolom besaran biaya yang dibutuhan hanya diisi beberapa kegiatan skala kecil dan sumber pendanaan tidak diisi oleh aparat Kelurahan/Desa maupun aparat Kecamatan. Mereka beralasan bahwa mereka tidak tahu cara menghitung kebutuhan dananya, hal ini seperti yang diutarakan oleh staf Kelurahan Nunukan Timur. Bpk. Pr,S.Sos :

> " waktu pembahasan rincian biaya dengan ketua RT, mereka tidak tahu berapa dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang diusulkan. Kami juga tidak bisa mengisi jumlah dananya karena rincian usulan yang tidak detail, dan kami juga tidak mempunyai kemampuan menghitung untuk memperkirakan berapa dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan, tidak ada staf kami yang berlatar belakang teknik. Untuk sumber pendanaan biarlah bappeda dan SKPD yang mengisinya"

Dukungan yang kongkrit dalam pengusulan kegiatan dalam musrenbang hanya diperoleh dari keikutsertaan masyarakat diwakili oleh ketua RT, Tokoh-tokoh, SKPD, DPRD, unsur wanita, dan instansi vertikal yang membuat kesepakatan dalam berita acara musrenbang di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan Nunukan. Dukungan yang kongkrit berupa dana, atau *sharing* dana dengan masyarakat tidak ada. Hal ini karena semua hasil musrenbang sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nunukan untuk mengerjakannya melalui sumber pendanaan APBD Kabupaten Nunukan, APBD Provinsi Kaltim, APBN.

4. Rumusan Tujuan

Tujuannya adalah tercapainya suatu kondisi atau keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu untuk mencapaikan dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Diharapkan adanya kesamaan pandangan dan tindakan dari masyarakat terutama dalam pengajuan usulan kegiatan diwilayahnya.

Kesamaan tujuan 5 tahun pembangunan di kabupaten nunukan yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sepatutnya mendapat dukungan dari masyarakatnya, dukungan tersebut dapat dilihat dari salah satunya berupa kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang. Namun ternyata pemerintah kabupaten tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap program pembangunan kepada masyarakat.

Pihak Bappeda menyampaikan dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan hanya kepada SKPD sebagai program mereka. Semestinya mereka juga perlu menyampaikan kepada masyarakat agar program yang diusulkan masyarakat lewat musrenbang bisa mendapat respon positif dari pemerintah karena merupakan program yang mensukseskan program pemerintah daerah juga.

Kesamaan merumuskan tujuan inilah yang tidak terjadi di setiap musrenbang Kelurahan/Desa maupun di tingkat musrenbang Kecamatan hingga musrenbang Kabupaten di Kabupaten Nunukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tidak pernah ada pembahasan program pemerintah kabupaten nunukan dalam setiap jenjang musrenbang, tentang bagaimana peran serta masyarakat dikaitkan dengan usulan yang mereka sampaikan dalam musrenbang.

5. Menetapkan Langkah-langkah Rinci.

Langkah rinci ini merupakan proses dalam musrenbang guna membuat apa saja yang akan dilakukan pada setiap usulan kegiatan baik dalam perencanaan maupun dalam sebuah rencana tindak yang akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan. Rencana tindak umumnya akan memuat apa saja yang akan dicapai dalam sebuah usulan kegiatan bagi kepentingan masyarakat, pembagian tugas dan tanggung jawab jika kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah baik pemeliharaan, maupun pemanfaatannya serta berapa lama kegiatan tersebut dapat dikerjakan.

Musrenbang yang dilaksanakan baik ditingkat Kelurahan/Desa maupun tingkat Kecamatan Nunukan, dalam pembahasannya tidak membuat langkah-langkah rinci. Hal ini dilakukan karena ketidaktahuan seluruh aparat kelurahan/desa dan kecamatan serta mereka menganggap waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan dilakukan pembahasan tersebut. Rapat musrenbang hanya diarahkan menampung usulan serta bagaimana usulan bisa disampaikan ke musrenbang Kabupaten, tidak berharap banyak seluruh usulan bisa direalisasikan, syukur jika bisa 30 persen dari usulan mendapat prioritas dikerjakan oleh SKPD pada tahun 2014.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Merancang Anggaran.

Merancang anggaran tidak semata-mata menghitung pendanaan kegiatan, melainkan upaya untuk mengalokasikan pembiayaan atau sumber daya yang tersedia serta pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan kegiatan itu nantinya. Merancang anggaran ini akan turut mendukung keberhasilan perencanaan.

Melihat pembahasan dalam musrenbang Kelurahan/Desa dan Kecamatan tidak ada sesi perancangan anggaran. Hal ini Nampak pada daftar usulan setiap musrenbang baik Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Penyusunan anggaran setiap usulan karena bersifat usulan tidak semua kegiatan yang dimasukan sumber dananya. Sedangkan kegiatan yang terdapat sumber dana dilakukan oleh aparat Kelurahan/Desa dan aparat Kecamatan yang mengisi dengan analisa biaya sendiri antar para pegawai. Sumber dana ini masih dicantumkan keterangan merupakan pagu indikatif. Sedangkan para kegiatan skala yang menengah keatas tidak diisi oleh aparat Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Mereka beralasan belum tentu juga disetujui dan tidak ada aparat yang mampu menghitung kebutuhan biaya, tetapi diserahkan kepada SKPD terkait ketika dibicarakan dalam musrenbang Kabupaten Nunukan.

Memahami derajat partisipasi masyarakat yang ditunjukan melalui pelaksanaan musrenbang Kelurahan/Desa dan musrenbang Kecamatan di Kecamatan Nunukan dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation Theory*) dari Sherry R. Armstein. Derajat partisipasi yang diperlihatkan masyarakat pada musrenbang yang diadakan di Kecamatan Nunukan menunjukan petanda adanya partisipasi masyarakat berada pada derajat tanda partisipasi. Pada derajat ini telah memperlihatkan aktivitas dialog antara pemerintah Kabupaten Nunukan dengan masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan didengar pendapatnya meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan menentukan kegiatan program pembangunan di Kecamatan Nunukan.

Dapat dijelaskan kondisi derajat tanda partisipasi di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yaitu :

1. Pemberian informasi

   Pemberian informasi menuniukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan.

   Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bappeda telah menerbitkan surat edaran kepada pihak Kelurahan/Desa dan Kecamatan untuk menyelenggarakan forum musrenbang sebagai wadah bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyusun sebuah prioritas perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijadikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang juga disampaikan kepada masyarakat lewat media internet sehingga masyarakat dapat melihat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan bisa memberikan masukan bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Nunukan.

2. Konsultasi

Konsultasi menunjukan adanya komunikasi dua arah antara pihak pemerintah daerah dengan masyarakat, misalnya survey sikap, temu warga dan dengar pendapat publik.

Forum Musrenbang yang dilaksanakan baik ditingkat Kelurahan/desa dan tingkat Kecamatan merupakan ajang bagi pemerintah Kabupaten Nunukan bertemu dengan warganya yang diwakilkan oleh ketua RT, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, instansi vertikal, kelompok tani. Pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bappeda, SKPD terkait dapat mendengarkan keluhan, saran bahkan kritikan terhadap pembangunan yang sudah berjalan. Pada kesempatan ini juga masyarakat memberikan masukan berupa usulan bagi pembangunan yang dibutuhkan oleh warganya.

3. Penentraman.

Penentraman merupakan upaya melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam kelompok pembuat kebijakan pembangunan meskipun pemegang kuasa yaitu pemerintah daerah tetap memiliki hak yang lebhi dalam pengambilan keputusan.

Usulan yang sudah disampaikan dalam musrenbang kecamatan Nunukan selanjutnya menjadi dokumen bagi pelaksanaan musrenbang Kabupaten Nunukan. Dalam musrenbang Kabupaten ini

UNIVERSITAS TERBUKA

masyarakat yang diwakilkan oleh beberapa orang tokoh atau ketua RT ikut serta dalam pembahasan usulan, memberikan masukan dan saran terhadap sebuah kegiatan yang berasal dari musrenbang Kecamatan. pengambilan keputusan terhadap usulan kegiatan yang disampaikan dalam musrenbang Kabupaten Nunukan akan ditetapkan oleh SKPD teknis bersama dengan Bappeda Kabupaten Nunukan yang selanjutnya akan disusun dalam sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014.

3. **Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan**

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pengeluaran sebuah prioritas usulan dengan merujuk pada Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ, dikaitkan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Hasil Analisis dari penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Faktor Intern

1) Kurangnya kesadaran/kemauan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil penelitian terhadap warga di beberapa Desa/Kelurahan, menunjukan bahwa warga masyarakat tidak memiliki semangat ikut dalam pertemuan yang dilakukan oleh pihak kelurahan yaitu :

2) Kekecewaan masyarakat terhadap hasil musrenbang yang sangat kecil persentase yang disetujui oleh SKPD. Banyak usulan yang sudah bertahun-tahun tapi tidak pernah direalisasikan, padahal usulan-usulan tersebut sudah mendesak dikerjakan, bahkan ada usulan yang masuk skala prioritas I tapi tidak diakomodir.

3) Lebih banyaknya realisasi kegiatan pembangunan berasal dari usulan sebagai Hasil Reses DPRD Kab. Nunukan.

Masalah muncul karena usulan hasil reses tersebut tidak masuk dalam pembahasan di Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dalam pelaksanaan malah banyak membuat masalah terhadap pemukiman warga, sebagai contoh, kegiatan penutupan parit yang justru menyebabkan banjir pada beberapa pemukiman warga, pembuatan jalan yang menuju dikebun warga dan tidak ada pemukiman warga ditempat tersebut. SKPD melaksanakan kegiatan dilokasi warga tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan warga, seperti bantuan kapal nelayan, padahal usulan kebutuhan warga adalah bantuan mesin kapal dan alat tangkap.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Masyarakat lebih senang beraktifitas dengan usahanya, karena sebagian besar warga Kecamatan Nunukan bergerak disektor perdagangan, wiraswasta, petani dan pegawai Negeri. Mereka lebih senang mencari nafkah dari pada harus menghadiri rapat seharian.

5) Dominannya kepemimpinan lokal.

Ketua RT dan Tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam melihat masalah dan kebutuhan untuk dijadikan dasar dalam menyusun daftar usulan masyarakat yang akan disampaikan dalam Musrenbang Des/Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini yang merupakan alasan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat tidak melaksanakan pertemuan dengan warga, mereka berpendapat bahwa Ketua RT telah mengetahui banyak kebutuhan warganya, apa yang perlu diusulkan, walaupun hasil pemeriksaan terhadap usulan masyarakat banyak juga usulan yang mengandung unsur subyektif, tidak memperhatikan usulan warganya, yang mana usulan tersebut merupakan usulan ketua RT sendiri, Nampak dari Lokasi dan komentar dari Aparat Kelurahan.

6) Rendahnya kesempatan/peluang masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pelaksanaan program pembangunan.

Beberapa tahun terakhir ini, banyak usulan yang disampaikan oleh Ketua RT mengatasnamakan usulan masyarakat dilingkungannya, hal ini ternyata untuk membuka peluang bagi warga RTnya untuk terlibat sebagai pelaksana pekerjaan jika usulannya diterima oleh SKPD dan akan direalisasikan tahun berikutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

b. Faktor Ekstern

1) Tidak adanya sosialisasi peraturan dan Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di daerah.

Pelaksanaan Musrenbang yang sudah dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan tahun 2013, berdasarkan hasil penelitian banyak tahapan dan dokumen Musrenbang yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, baik terhadap Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ, maupun terhadap Permendagri 54 Tahun 2010. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan ternyata selama ini tidak ada sosialisasi dari Bappeda Kabupaten Nunukan bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan berkenaan mekanisme dan tahapan yang harus dilaksanakan serta kelengkapan dokumen keluaran sebagai bahan pada Musrenbang yang lebih tinggi. Masalah ini diakui oleh Bappeda Kabupaten Nunukan yang tidak pernah menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati berkenaan dengan Mekanisme Perencanaan di Kabupaten Nunukan.

Perlunya Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui Bappeda untuk menyampaikan program prioritas daerah setiap tahunnya sebagai bahan masukan bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan ketika mencermati usulan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

2) Pembiayaan yang dimiliki pemerintah untuk kegiatan Musrenbang di tingkat Kelurahan/desa dan Kecamatan yang sangat minim.

Dalam setiap pelaksanaan Musrenbang khususnya tahapan penyediaan usulan sudah dirapatkan di tingkat RT dengan melibatkan warganya, kenyataanya hal ini tidak dilaksanakan dengan alasan ketiadaan dana. Demikian juga masalah dana menjadi permasalahan untuk menghimpun perwakilan dari semua unsur masyarakat. Bahkan ada Kelurahan yang tidak ada alokasi dana Musrenbang Kelurahan.

Hal perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah jika ingin melihat proses Musrenbang yang benar-benar dibuat dari sebuah mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari tingkat RT hingga pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

3) Kurangnya prosentase Program yang direalisasikan oleh SKPD.

Usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kecamatan, hingga realisasi program jika diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD membutuhkan waktu 1 (satu) tahun. Hal ini juga yang membuat masyarakat kurang bergairah mengikuti Musrenbang karena mereka harus menunggu 1 (satu) tahun untuk melihat pelaksanaan program yang mereka usulankan. Padahal kebanyakan usulan masyarakat melalui Ketua RT adalah usulan yang mendesak untuk dikerjakan, dikhawatirkan jika dikerjakan tahun berikutnya akan memberikan masalah yang lebih besar pula.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan ini akan dilakukan kajian beberapa hal yang berkaitan dengan teori administrasi publik serta teori partisipatif yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

a. Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi kasus di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, oleh Agus Harto Wibowo (tahun 2009). Hasil pengamatan menunjukan beberapa kesimpulan yaitu :

1) Keterlibatan masyarakat Kecamatan Pemalang dalam mengetahui, menggali dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dimulai dari tingkat RT/RW hingga pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pemalang.

2) Data masalah yang ada di masyarakat di olah oleh tim perumus musrenbang hingga diperoleh gambaran yang lengkap, utuh dan mendalam terhadap permasalahan di Kecamatan Pemalang. Perumusan masalah juga telah melibatkan semua unsur *stakeholder* yang ada di Kecamatan Pemalang.

3) Dukungan berupa uang dan sumber daya lainnya tidak ada karena hasil musrenbang berisi usulan kegiatan.

4) Musrenbang Kecamatan Pemalang sudah menerapkan prinsip-prinsip : - Transparan, -Responsif, - Partisipatif, - Akuntabel.

5) Hasil dari Musrenbang Kecamatan Pemalang hanya usulan kegiatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi oleh Irma Purnamasari (tahun 2008).

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat dapat dilihat dari:

1) Ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan;
2) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan;
3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang, karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses perencanaan pembangunan dijadwalkan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, seperti keterbatasan akan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses perencanaan pembangunan. yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

satunya tercermin dari pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

Terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu terhadap penelitian yang saya lakukan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persamaan. penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan peneliti terdahulu yaitu menggali permasalahan berkenaan keterlibatan partisipasi masyarakat pada tahapan mekenisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Beberapa teori yang sama digunakan untuk menjawab permasalahan partisipasi masyarakat yaitu teori wicaksono dan sugiarto, serta teori yang dikembangkan oleh Alexander Abe.
2. Perbedaan. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada bagaimana tahapan sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang dikeluarkan oleh Kementrian Negara PPN/Bappenas dan Departemen Dalam Negeri, Nomor 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007 disetiap Musrenbang Kelurahan/desa dan Kecamatan.

2. Administrasi Publik

Peranan administrasi publik sangat penting dalam mengawal pencapaian tujuan Penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan fungsi kebijakan dan program-progam kegiatan pemerintah.

Administrasi publik menurut Waldo (1991;15) memiliki dua buah definisi yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
2. Administrasi Publik adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.

Antara organisasi dan manajemen dalam administrasi publik memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, organisasi menunjukan struktur atau perangkat sedangkan manajemen diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya melalui orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Kombinasi keduanya melalui penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perubahan orientasi dan peran administrasi publik diperlukan untuk merespon dinamika masyarakat yang tinggi terutama untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif serta menciptakan keadilan sosial bagi warga masyarakat. Hal ini perlukan karena administrasi publik berfungsi sebagai instrumen publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian lain berkenaan Administrasi publik oleh Henry (1995: 25) menyatakan bahwa :

> "Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.".

Apa yang penting dalam menjalankan administrasi publik adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan dirinya sebagai masyarakat secara bersama-sama dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sesuai bidang tugasnya memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan bersama mereka.

Walaupun proses administrasi publik menempatkan pemerintah sebagai lembaga utama atas tugas-tugas pemerintah, proses tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai sumber legitimasi dan tujuan dari mana dan kepada siapa proses administrasi diselenggarakan. Dalam Negara yang demokratis, proses administrasi publik dilakukan atas mandat yang diberikan oleh publik melalui proses yang melibatkan publik dan untuk sebesar-besarnya manfaat yang dapat diterima publik (Harmon & Mayer, 1986 : 6).

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
b. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
c. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Mulluk (2007 : 57) Pada dasarnya partisipasi tidak berlaku seragam di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan telah bersifat partisipatif. Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipatisi.

Partisipasi masyarakat juga dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Sherry R. Arnstein (dalam Mulluk 2007:58) melalui Teori *Ladder of Participation* (tangga partisipasi). Sherry R. Arnstein menyatakan terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi.

Gambar 2.1. Tangga Partisipasi dari Sherry R. Arnstein.

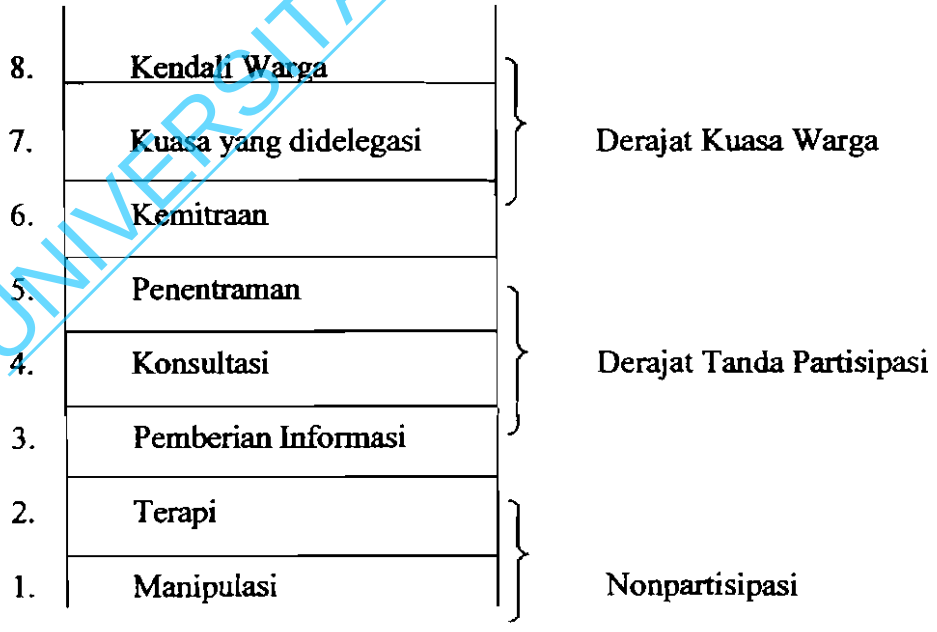

Disini Arnstein menjelaskan sebagai berikut :

1. Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas partisipasi pada derajat ini merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya

UNIVERSITAS TERBUKA

tidak mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Dalam derajat ini terdapat dua anak tangga, yakni manipulasi dan terapi.

2. Derajat kedua. Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi daripada derajat sebelumnya.Derajat ini melibatkan aktifitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam derajat ini terdapat tiga anak tangga yakni pemberian informasi, konsultasi dan penentraman.
3. Derajat tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga.

Khususnya dalam penyiapan dan memperbaiki pelayanan publik dalam kaitan dengan perencanaan partisipatif Wicaksono dan Sigiarto (dalam Wijaya,2001) berpendapat bahwa :

> " Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Fokus pada kepentingan masyarakat.
   a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
   b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris

   Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara,waktu dan tempat.
3. Sinergitas
   a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
   b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
   c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
   d. Memperhatikan interaksi diantara *Stakeholder*
5. Legalitas
   a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
   b. Menjunjung etika dan tataa nilai masyarakat.
   c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting. Hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan adalah berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, seperti yang disampaikan Bastian (2009:16) sebagai berikut :

> "Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keikutsertaan masyarakat akan menguatkan tingkat kepercayaan dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini akan membuat ringan kerja pelaksanaan pembangunan".

Akibat keterlibatan dalam perencanaan, akan membuat masyarakat akan merasakan pembangunan yang lebih nyata dengan memantau pelaksanaan program/kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan dan masyarakat akan lebih terarah dan tepat guna.

Menurut Bastian (2009) Pendekatan partisipasi menjadi alternatif pilihan yang mengemuka untuk memberikan peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan diberbagai tahap pembangunan (perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan). Model pendekatan partisipasi untuk proses perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Institusionalisasi dan prosedur proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Model pendekatan dalam proses atau tahapan pembangunan. Institusionalisasi model pendekatan dengan melibatkan aktor pembangunan (swasta,masyarakat dan pemerintah daerah sebagai mediator). Di tingkat masyarakat, keberhasilan pendekatan ini akan dirasakan oleh masyarakat dalam upaya mengorganisasi diri, meningkatkan proses demokratisasi, meningkatkan peran serta (partisipasi), serta mendudukan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Keberhasilan model pendekatan ini akan mampu "memberdayakan" aktiva potensi daerah guna mempercepat kemampuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah ".

Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang diharapkan,menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Abe (2002;81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut :

> "Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat".

Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 2.2. Langkah-langkah perencanaan partisipatif.

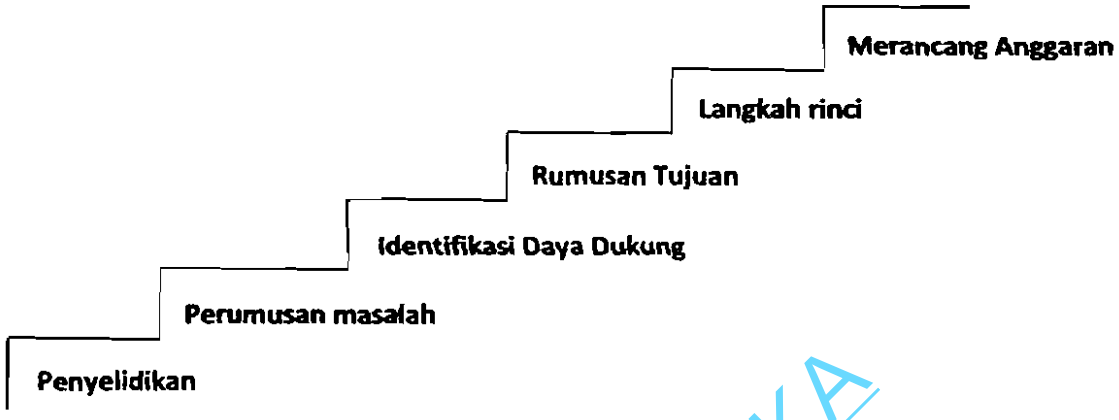

Sumber : Alexander Abe (2002:100)

Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan Tujuan. Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dank karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.
5. Langkah Rinci. Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana induk.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Merancang Anggaran, bukan berarti menghitung uang, melainkan usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Conyers (1994;154) ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan Nasional di Indoenesia menurut Bastian (2009:60) dikelompokan menurut periode jangka waktu, dimensi pendekatan dan koordinasi, serta proses/hirarki penyusunan.

b. Perencanaan Menurut Jangkauan jangka waktu

Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada periode waktu terdiri atas : (1) rencana untuk pembangunan jangka panjang (PJP) dengan periode 25 tahun, (2) rencana pembangunan jangka menengah dalam periode 5 tahun, dan (3) rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN. APBN beserta nota keuangan dan kelengkapan lainnya

UNIVERSITAS TERBUKA

merupakan rencana tahunan dan merupakan bagian dari penjabaran rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

c. Perencanaan menurut dimensi Pendekatan dan Koordinasi

Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro dan menyeluruh. Dalam perencanaan makro dikaji seberapa pesar pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan. Seberapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain secar makro dan menyeluruh.Perencanaan makro dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara secara cermat keterkaitan dengan perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan berdasarkan sektor yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri serta tujuan, untuk mempermudah perhitungan dalam mencapai sasaran makro. sedangkan perencanaan dengan dimensi pendekatan regional, pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi dipusat dalam melihat aspek ruang disuatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang menitikberatkan pada sektoral melihat "lokasi dan kegiatan" sedangkan pemerintah daerah yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah). Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas pembangunan sektor-sektor diberbagai daerah dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor.

c. Perencanaan menurut proses/Hirarki penyusunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi : (1) perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning)* dan (2) perencanaan dari atas ke bawah (*Top-down planning)* perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti dengan didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul, karena perencanaan dari bawah ke atas ini prosesnya dimulai dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan terkena dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut.

Masih menurut Bastian (2009) penerapan pendekatan dari atas ke bawah tidak lagi sepenuhnay dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Untuk itu perlu diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme yang disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dengan memanfaatkan forum-forum Musyawarah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan. Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi diupayakan untuk mengadakan koordinasi perencanaan sektoral dan regional.

Usulan atau masalah yang bersifat lintas wilayah atau lintas sektoral dan tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawa ke tingkat diatasnya. Proses berjenjang ini diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan.

Dalam sebuah perencanaan pembangunan tentu memiliki unsur-unsur yang membentuknya dalam pencapaian harapan yang diinginkan. *Planning* atau perencanaan menurut Conyers (1994:3) adalah sebagai:

> "suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang".

Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah :

> "Memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan".

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) adalah

> 'Memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus".

Pengertian diatas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan suatu pilihan dapat mencapai sebuah hasil yang akan dicapai pada masa akan datang dengan memperhatikan alternatif atau pilihan, asumsi dan fakta

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang terjadi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sudah tentu perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan pendanaan. Suatu perencanaan jika dikaitkan dengan pembangunan adalah mampu menjawab segala permasalahan, dapat memenuhi keinginan masyarakat, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan menurut Syamsuddin, dkk, (2007; 2) adalah :

> "merupakan suatu proses yang bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, sangat terkait dengan kegiatan pengalokasian sumber daya, usaha pencapaian tujuan dan tindakan dimasa depan".

Sedangkan menurut Pusic berkenaan dengan perencanaan (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa :

> "Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas".

Berdasarkan pandangan Pusic, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dapat dlihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partsipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partsipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari. Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Berkenaan hal diatas sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

a. Tahap Assesment

b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.

c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.

d. Tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil).

Sesuai pendapat Adi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam menyusun kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Partisipasi menurut Mikkelsen (2006:65), menyebutkan bahwa secara garis besar ada 2 pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu:

a. Partisipasi datang dari masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. Namun demikian sedikit saja masyarakat yang mau melakukan pendekatan partisipasi secara sukarela dalam kegiatan pembangunan.

b. Partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Dengan pendekatan ini masyarakat dipaksa untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan dengan motivasi agar dapat melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan secara lebih baik. Selanjutnya disebutkan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan dengan tingkat

UNIVERSITAS TERBUKA

paksaan dan sukarela yang berbeda-beda, serta tingkat keaktifan masyarakat yang berbedabeda pula. Namun demikian, guna mencapai keberhasilan ake pembangunan, partisipasi aktif dan sukarela merupakan hal ideal yang harus diupayakan.

Menurut Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya, perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan "perencanaan" sebagai "suatu proses yang bersinambungan", mencakup "keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai aiternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang." Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni :

1. *Pemilihan.* "Merencanakan berarti memilih," kata Yulius Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.

2. *Sumber daya.* Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup pro-ses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.
3. *Tujuan.* Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.
4. *Waktu.* Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) menyatakan bahwa

> "perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas".

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian

UNIVERSITAS TERBUKA

kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan *top down* ke pembangunan partisipatif. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ditinjau dari legal formal menurut Salahudin (2012:44) bahwa untuk mencapai tujuan otonomi daerah, akan sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program dan penganggaran pembangunan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar penjaringan aspirasi masyarakat oleh para perencana atau pengambilan keputusan dari pemerintahan, tetapi lebih dari itu adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

B. kerangka Berfikir.

Berikut adalah kerangka berfikir studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan..

Gambar 2.3. Kerangka berfikir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

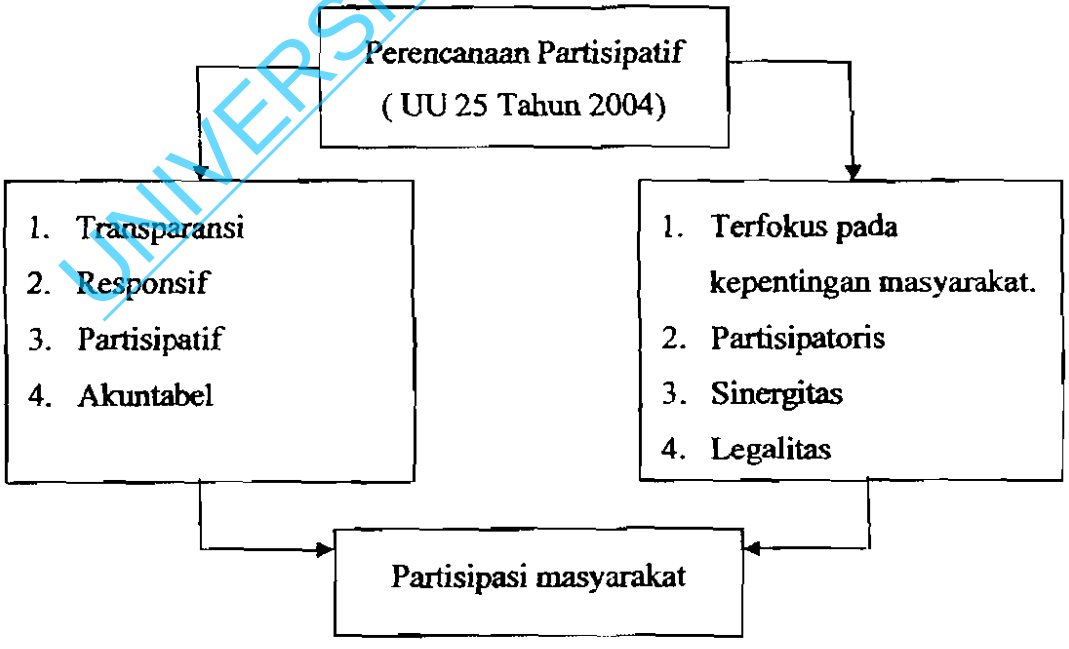

Sumber : Perencanaan partisipatif dari Wicaksono dan Sigiarto serta Alexander Abe.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan perpektif pendekatan kualitatif. Strauss dan Corbin (1990) menyatakan terdapat alasan perlunya dilakukan penelitian kualitatif yaitu :

1. Sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif.
2. Untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk melihat fakta kemudian dilukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekwensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reliabilitas (Nazir, 1983)

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antarafenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

Pendapat Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman.

Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik-karakteristik seperti yang dikemukakan Furchan (2004) bahwa :

1) penelitian deskriptif cendrung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.
2) Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan,.
3) Tidak adanya uji hipotesis.

Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama :

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang;
2. Daya yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

Pada metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam seberapa jauh tingkat efektifitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Dengan Pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Fokus penelitian adalah Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

B. Informan Penelitian

Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini :

1. Badan Perencanana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nunukan sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan.
2. Camat Nunukan.
3. Lurah se Kecamatan Nunukan
4. Kepala Desa Binusan
5. Perangkat kelurahan.
6. Ketua RT.
7. Anggota BPM di Desa Binusan.
8. Tokoh Masyarakat.
9. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Komisi I.

Informan dalam penelitian ini dipilih Karena paling banyak mengetahui tentang proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

41596.pdf

C. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (1992;29) instrument penelitian ini tidak bersifat eksternal atau obyektif akan tetapi internal subyektif yaitu peneliti sendiri tanpa menggunakan test, angket atau eksperimen.

Dalam penelitian ini tugas seorang peneliti sangat berperan dalam keseluruhan proses. Disini Peneliti sendiri yang melakukan *Indept Interview* (wawancara mendalam), termasuk dalam menyiapkan bahan wawancara atau pertanyaan berkenaan hal-hal yang akan ditanyakan. Bahan wawancara ini akan memudahkan peneliti dalam mengarahkan pertanyaan atau pembicaraan saat dilakukan wawancara terhadap para informan, dan tentu akan berkembang sesuai wawancara yang dilakukan.

Adapun alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian serta alat bantu lainnya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melakukan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan-catatan publik, berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan pada penelitian. Data sekunder ini dapat berupa buku, literatur, table.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Jenis wawacara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya dituntut banyak informan yang dijadikan sumber yang akan diwawancara guna mendapatkan data yang lebih dalam dan terinci serta pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Disini diperlukan kemampuan dan kejelian pewawancara dalam melakukan pelacakan dan pendalaman terhadap bahan yang diperlukan oleh penulis.

b. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktifitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

E. Metode Analisis Data.

Yang Penting dalam sebuah analisis data adalah bagaimana data yang diperoleh dari informan atau sumber lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dapat disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus dapat memberikan makna atau interpretasi sehingga data hasil wawancara hasil data tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken (dalam Moleong 2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (1992;16)

Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif *(Interactive Model Analysis)*

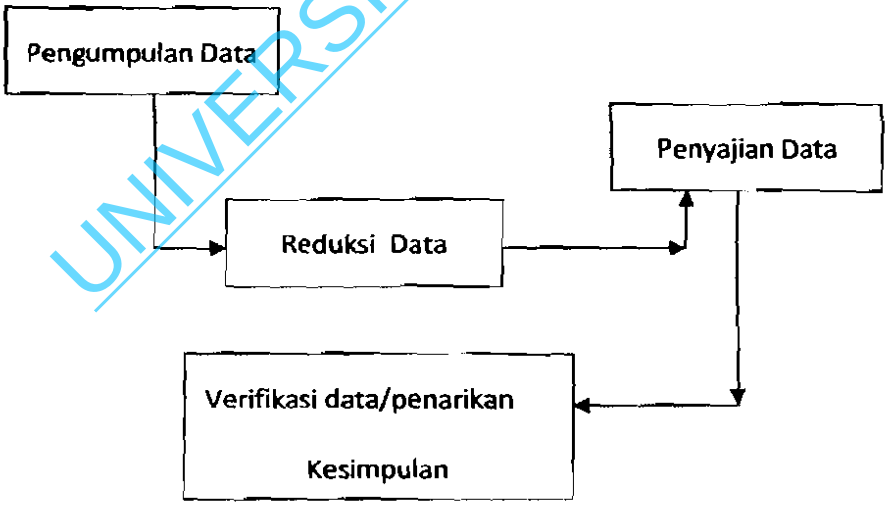

Sumber : Milles dan Huberman (1992 ; 16)

Gambar diatas memperlihatkan sifat interakif koleksi data atau pengumpulan data dengan sebuah analisis data. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Pengumpulan data.

   Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap masalah penelitian. Data diperoleh melalui data primer, yaitu berasal dari wawancara mendalam dan observasi, kemudian data sekunder yaitu dari buku, literature dan table.

2. Tahap Reduksi Data.

   Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian melalui tahapan pembuatan ringkasan, membuang yang tidak perlu, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan serta. Penulis melakukan triangulasi yaitu proses *check and recheck* antara sumber data dan mengelompokannya dalam kelompok sumber data yang senada dengan pendapat sumber lain, mengelompokan sumber data yang berbeda pendapatnya dengan sumber yang lain, serta mengelompokan sumber data yang bertolak belakang dengan sumber data mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. *Tahap penyajian data.*

   Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matrik (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh, penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun dengan baik dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Disini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

   Pada tahap ini juga penulis melakukan

4. Tahap Verifikasi data/ Penarikan Simpulan.

   Verifikasi data penelitian *yaitu menarik simpulan* berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang di Desa, Kelurahan dan Kecamatan Nunukan belum berjalan dengan baik, disebabkan oleh :

a. Belum dilakukan tahapan perencanaan sesuai surat Edaran Bersama kepala Bappenas dengna Mendagri, Nomor 008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ, serta Permendagri 54 tahun 2010.

b. Tampak bahwa pihak aparat desa/kelurahan masih mengandalkan para Ketua RT yang menyusun usulan di wilayahnya masing-masing.

c. Pihak Kelurahan belum mengoptimal keterlibatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dengan tidak menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan.

d. Keterbatasan waktu dan pembiayaan untuk melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

e. Masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, pengurus LPM atau unsur lain tidak diberi kesempatan banyak untuk mendiskusikan atau memberikan pandangan terhadap sebuah usulan. Mereka juga tidak dilibatkan dalam penetapan daftar usulan proritas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Usulan yang disampaikan belum menunjukan sinkronisasi antar program SKPD dengan usulan Kecamatan yang merupakan daftar usulan Kelurahan.

g. Perencanaan Pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah sesuai sumber hukum.Namun dalam teknis pelaksanaan di Kabupaten Nunukan, Pemerintah daerah hingga saat ini belum menerbitkan mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. sebagai panduan dalam proses perencanaan ditingkat RT/RW hingga pada Musrenbang Kabupaten Nunukan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan.

h. Dalam menyusun daftar prioritas usulan sebagian besar usulan tersebut tidak disertakan besaran biaya yang dibutuhkan pada setiap kegiatan, hal ini karena keterbatasan Sumber daya manusia.

i. proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada tingkat RT tidak dibuka ruang bagi keterlibatan masyarakat secara langsung. Keputusan terhadap usulan yang akan diangkat ditingkat Desa/Kelurahan hanya diketahui oleh Ketua RT.

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

a. Partisipasi masyarakat tidak banyak berperan dalam pelaksanaan musrenbang karena usulan yang disampaikan merupakan hasil penyusunan oleh ketua RT.

UNIVERSITAS TERBUKA

b. Keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang hanya diwakilkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, kelompok tani, pengurus LPM.

c. Kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan dan kritikan juga terbatas karena acara musrenbang yang dibatasi hanya 3-4 jam saja karena keterbatasan anggaran.

d. Kurang tertariknya masyarakat mengikuti kegiatan musrenbang karena sangat sedikit dari sekian banyak usulan mereka mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Usulan yang berasal dari anggota DPRD justru yang mendapat prioritas dikerjakan.

e. Partisipasi masyarakat hanya pada penyusunan usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, selanjutnya pada tahap pengambilan keputusan terhadap usulan di musrenbang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Bappeda dan SKPD terkait.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

a. Faktor Intern

1) Kurangnya kesadaran/kemauan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan.

2) Lebih banyaknya realisasi kegiatan pembangunan berasal dari usulan sebagai Hasil Reses DPRD Kab. Nunukan.

3) Masyarakat lebih senang beraktifitas dengan usahanya, karena sebagian besar warga Kecamatan Nunukan bergerak disektor

UNIVERSITAS TERBUKA

perdagangan, wiraswasta, petani dan pegawai Negeri. Mereka lebih senang mencari nafkah dari pada harus menghadiri rapat seharian.

4) Dominannya kepemimpinan lokal.

5) Rendahnya kesempatan/peluang masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pelaksanaan program pembangunan.

b. Faktor Ekstern

1) Tidak adanya sosialisasi peraturan dan Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di daerah.

2) Pembiayaan yang dimiliki pemerintah untuk kegiatan Musrenbang di tingkat Kelurahan/desa dan Kecamatan yang sangat minim.

3) Kurangnya prosentase Program yang direalisasikan oleh SKPD.

B. Saran.

Hasil penelitian ini terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun Peraturan Bupati berkenaan mekanime perencanaan mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan yang bersifat partisipatif mudah dilaksanakan dengan hasil yang maksimal.
2. Diminta kepada Bappeda Kabupaten Nunukan untuk melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam proses perencanaan pembangunan, seperti ketua RT, Aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. Agar pihak DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengambil usulan aspirasi masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan masyarakat, bukan untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sekelompok masyarakat saja. Sebaiknya usulan tersebut disertakan dalam Musrenbang, baik ditingkat Kelurahan/desa maupun Kecamatan.

4. Alokasi anggaran yang memadai bagi kelurahan dan kecamatan agar Musrenbang yang dilakukan dapat lebih maksimal menggali potensi dan sekaligus mendalami usulan yang disampaikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah Pertisipatif*,, Solo : Pondok edukasi.

Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.

Bastian, Indra. (2009). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat.

Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar,* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Conyers dan Hills. (1994). *SIMRENAS:Panduan Pemahaman dan Pengisian Data Dasar Perencanaan Pembangunan 3.* Diambil 22 Juni 2013 dari http://www.Bappenas.go.id/….et-file-server/node/733/

Hasibuan, Malayu, S.P. (1993), *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah,* Jakarta : CV. Haju Masagung.

Harmon, Michael M. & Richard T. Mayer. (1986). *Organization Theori for Public Administration,* Boston : Little Brown and Company.

Henry, Nicholas. (1995). Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik, Jakarta : Rajawali Press.

Mulluk, M.R.K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah,* Malang : Bayumedia Publishing, Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW.

Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT. Remaja Rosada Karya.

Mikkelsen, Britha.(2006). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan,* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Milles, MB & Hubberman,AM. (1992). *analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyanto, Jakarta : IU Percetakan.

Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito

Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitia,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Purnamasari, Irma. (2008). *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi,* Tesis Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro, Yogyakarta.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Riyadi dan Bratakusumah, D.S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rekso Putranto, Soemadi. (1992). *Manajemen Proyek Pemberdayaan,* Jakarta : Lembaga Penerbitan FE-UI.

Salahuddin. (2012). *Korupsi, Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, Jogyakarta: Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima.

Soemarmo. (2005). *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik),* Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Strauss and Corbin. (1990). *Basic of Quantitatif,* London : Sage Publication.

Sukmadinata (2006:72)., Furchan (2004:447). Penelitian Deskriptif . diambil tanggal 25 Juli 2013, dari http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/27/penelitian-deskriptif/

Syamsuddin, Neldysavrino, dkk. (2007). *Governance Brief, Sudahkan Aspirasi Masyarakat Terakomodir Dalam Rencana Pembangunan? (Studi Kasus Sebuah Aksi Kolektif di Jambi),* Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *manajemen Pembangunan,* Gunung Agung, Jakarta.

Keban, Yeremias. (2004). "*Enam Dimensi Administrasi Publik*": *Konsep Teori dan Isu.* diambil 3 Juni 2013 dari http://hardiaputra.blogspot.com/2008/03/administrasipublik.html

Waldo, Dwight. (1971). Pengantar Studi Public Administration (Terjemahan oleh Slamet W. Atmosoedarmo). Jakarta ; Tjemerlang.

Wijaya, Rina. (2001). *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, Kota Surabaya)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Wibowo, H,Adi. (2009). *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang),* Tesis Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro, Yogyakarta.

UNIVERSITAS TERBUKA

Sumber Lain

Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial , Bappeda Kabupaten Nunukan. Maret 2012.

Laporan Kependudukan Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Nunukan. Tahun 2013.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Profil Dinas Pendidikan , Dinas Pendidikan Kab. Nunukan, Tahun 2013.

Profil Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Tahun 2012.

Profil Kabupaten Nunukan, Kerja Sama Bappeda Kabupaten Nunukan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan, tahun 2011-2016.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Musrenbang.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Berikut disampaikan pedoman wawancara yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan bahan-bahan yang dipergunakan dalam tesis ini. Adapun daftar pertanyaan yang disampaikan kepada informan yaitu :

1. Apakah bapak/ibu selaku ketua RT mendapat undangan menghadiri Musrenbang di Kelurahan? jika ya, apa tanggapan bapak terhadap undangan Musrenbang tersebut?
2. Bagaimana bapak/ibu menyiapkan bahan usulan dari RT bapak/Ibu?
3. Apakah bapak/ibu selaku ketua RT sudah melakukan pertemuan dengan warga untuk mendiskusikan usulan apa yang perlu dibawa pada Musrenbang Kelurahan?
4. Sudah berapa kali bapak/ibu menghadiri acara Musrenbang di kelurahan?
5. Mrengapa usulan bapak tidak terlalu banyak, padahal mungkin banyak kebutuhan warga yang perlu diusulkan pada Musrenbang supaya bisa dikerjakan oleh SKPD?
6. Apa kebutuhan Bapak/Ibu yang perlu diusulkan pada Musrenbang Kelurahan?
7. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan Musrenbang yang setiap tahun dilaksanakan?
8. Apa komentar Bapak/Ibu terhadap usulan warga yang sampai sekarang tidak pernah ditanggapi oleh Pemerintah Daerah?
9. Apakah sudah pernah informasi lisan kepada ketua RT pada pertemuan-pertemuan dikelurahan/desa untuk mempersiapkan bahan usulan yang akan dibahas di Musrenbang?
10. Sudah pernahkah sosialisasi oleh Bappeda di kelurahan berkenaan dengan Musrenbang ?

UNIVERSITAS TERBUKA

11. Aoa tanggapan bapak/ibu terhadap hasil reses DPRD yang lebih banyak dikerjakan oleh Pemda Kab. Nunukan dibandingkan dengan usulan warga yang disampaikan lewat Musrenbang?
12. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu terhadap proposal yang diutamakan dan dikerjakan SKPD padahal tidak melalui Musrenbang?
13. Siapa saja yang mengerjakan kegiatan proyek Penunjukan langsung yang berasal dari hasil reses anggota DPRD, dan bagaimana hasilnya?
14. Mengapa kegiatan musrenbang hanya dilaksanakn hanya beberapa jam saja, padahal banyak yang perlu didiskusikan terhadap usulan dari warga?
15. Apa manfaat bagi bapak/ibu selama mengikuti Musrenbang ini?
16. Apa saran bagi pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap usulan warga yang disampaikan lewat Musrenbang?
17. Mengapa yang diundang hanya Ketua RT dan tokoh masyarakat?
18. Mengapa saat rapat Musrenbang tidak dilakukan penyusunan daftar usulan dari RT berdasarkan tingkat prioritas tetapi diserahkan kepada ketua RT?
19. Apa kendala pelaksanaan Musrenbang, padahal setiap tahun dilakukan oleh kelurahan/desa dan kecamatan?
20. Apa pendapat bapak selaku Bappeda terhadap kegiatan musrenbang di tiap kelurahan dan kecamatan?
21. Mengapa setiap Musrenbang di tingkat kecamatan/desa yang penulis amati, seperti rapat biasa, padahal Musrenbang tersebut lebih banyak diskusi dan pembahasan setiap usulan warga serta penyusun skala prioritas?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

22. Apa pendapat bapak selaku anggoata DPRD kabupaten Nunukan terhadap pelaksanana Musrenbang baik ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan?
23. Bagaimana pendapat bapak selaku anggota DPRD melihat masalah reses yang tidak masuk dalam musrenbang tetapi justru hasil reses tersebut yang dikerjakan?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2. Matrik Hasil Wawancara dari Informan

No.	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
1.	Kehadiran mengikuti Musrenbang	a. ketua RT . - Memang sudah merupakan kebiasaan ketua RT diundang untuk membawa usulan RT. - Datang mendengarkan saja, kalau diminta baru saya sampaikan usulannya. b. Pejabat Kelurahan - Ketua RT dianggap sudah memahami usulan yg akan dibicarakan, juga diundang tokoh masyarakat dan LPM, jadi cukup mereka saja yg hadir. c. Tokoh Masyarakat - Perlu dihadiri dan mendengarkan apa yang akan dilaksanakan pembangunan di wilayah kita. - Rasanya malas menghadiri, usulan bagusnya lewat proposal saja, tidak perlu lewat Musrenbang.	- Merupakan acara rutin membicarakan usulan warga. - Cukup Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan LSM saja. - Perlu dihadiri, walaupun usulan proposal yang diutamakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
2.	Peranan masyarakat dalam menyusun usulan .	a. Lurah - Hanya sedikit ketua RT yang mencari aspirasi dengan warganya, banyak ketua RT tidak membuat pertemuan dengan warganya. - Saya sudah menyarankan agar dilakukan pertemuan dengan warga untuk mendapat usulan. b. Ketua RT - Saya tahu permasalahan dan usulan apa yang diperlukan untuk proyek di lingkungan RT saya. - Saya sudah keliling sambil berbicara dengan warga. - Ketika mendapat surat dari kepala desa, saya langsung mendatangi warga menanyakan usulan apa saja. - Wah ga usalah buat pertemuan, biayanya siapa yang nanggung, saya sudah sering ketemu warga kok. - Apa masih perlu membuat rapat, biar saya yang membuat, kasihan warga diajak rapat, yang dikerjakan nanti bukan usulan mereka. - Kami hanya ditelpon ibu dari kelurahan, kalau saya tahu sebelumnya, pasti saya buat rapat dengan warga biar tidak diprotes nantinya. - Tidak usalah, saya juga tahu permasalahan dan kebutuhan apa yang perlu diusulkan, mana yang tidak, nanti juga masih dirapatkan apakah usulan bisa masuk atau tidak.	- Sudah disarankan, tetapi banyak RT yang tidak melaksanakan. - Ketua RT sudah tahu kebutuhan dan proyek apa yang diperlukan tanpa harus membuat pertemuan. - Pendanaan yang menjadi permasalahan jika rapat dibuat dengan mengundang warga.

UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
	.	c. Camat - Proposal yang akan disampaikan kepemda sebaiknya disalurkan lewat Musrenbang, karena sangat mengganggu musrenbang, itu yang membuat malas warga datang. d. Warga - tidak pernah pak RT mengundang warganya membahas permasalahan kampung, kalau ada kami bisa sumbang saran. - ngak pernah ada rapat, padahal bagus membahas pekerjaan yang dibutuhkan, agar pemerintah tahu kebutuhan warganya. - Kami kurang mengerti, karena tidak dikonfirmasi RT, nanti kalau dikerjakan oleh DPU, kami protes. e. Anggota DPRD. Masih banyak usulan dibuat oleh pihak-pihak tertentu, ini bisa dilihat dari lokasi yang diusulkan, ini resiko kalau kepercayaan diserahkan seluruhnya kepada Ketua RT.	- Proposal sebaiknya lewat jalur prosedur musrenbang. - Ada keinginan warga, tetapi ketua RT enggan melaksanakan. - Resiko kepercayaan diberikan kepada RT ternyata usulan masih didominasi pihak tertentu.

UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
3.	Realisasi dari usulan Musrenbang.	a. Tokoh Masyarat - Usulan nanti juga tidak dipakai, karena lain yang diusulkan, lain yang dikerjakan. - Sudah sering saya ikut acara ini, pemda kurang menerima usulan kita, masih ada usulan yang bertahun-tahun tidak ada realisasi. - Sudah sering menghadiri, tetapi pemerintah lebih memperhatikan usulan proposal, percuma rapat seperti ini. b. Ketua RT - Saya tidak menyampaikan usulan banyak-banyak, karena belum tentu disetujui, lebih banyak pekerjaan PL yang dikerjakan. - Kami hanya mengusulkan 3 kegiatan saja, syukur bisa masuk, nanti juga yang dikerjakan justru usulan lain.	- Pemda kurang menerima usulan warga, tetapi usulan proposal yang banyak diterima. - Tidak perlu mengusulkan banyak, karena belum tentu dapat diakomodir pemda.

UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
4.	Permasalahan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang	a. Lurah - Saya tidak dapat mengundang banyak warga, karena perlu dana besar, karena anggaran kelurahan yang kecil. - Saya tidak undang semua, karena Ketua RT dan tokoh masyarakat sudah tahu usulan warganya. - Perbincangan usulan seharusnya mendengarkan semua usulan dari RT, tetapi karena waktu terbatas, jangan lewat jam makan siang, maka diskusi tidak saya lakukan. b. Ketua RT. - Sudah ada proposal yang disampaikan oleh warga kepada saya, untuk diusulkan ke Pemda. c. Warga masyarakat. - Saya datang ikut dengan ketua RT, sekaligus mengecek usulan saya masuk atau tidak. - Kebutuhan kami perlunya tambahan insentif bagi kader posyandu.	- Pendanaan yang kurang. - Kepercayaan kepada RT yang lebih dominan mewakili warganya. - Proposal yang lebih diutamakan. - Usulan non fisik tidak banyak diakomodir.

UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
		d. Bappeda. - Masyarakat banyak yang tidak mengerti tujuan kegiatan ini, perlu diberikan pemahaman bahwa merencanakan pembangunan merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. - Aparat kelurahan dan kecamatan harus turut membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. e. Camat - Perencanaan tidak sekedar didasarkan pada daftar keinginan pihak tertentu, melainkan benar-benar berasal dari kebutuhan nyata seluruh masyarakat melalui penilaian setiap usulan. - Saya sadar bahwa masih banyak usulan yang belum masuk, seperti kegiatan non fisik, kelompok PKK, kaum miskin, kegiatan pemuda.	- Belum mengerti dan pemahaman akan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan sehingga perlu sosialisasi. - Hasil musrenbang banyak tidak mengakomodir usulan non fisik. - Perencanaan bukan daftar keinginan pihak tertentu saja.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3. Foto wawancara dengan Informan

Gambar 1. Wawancara dengan BPM desa Binusan.

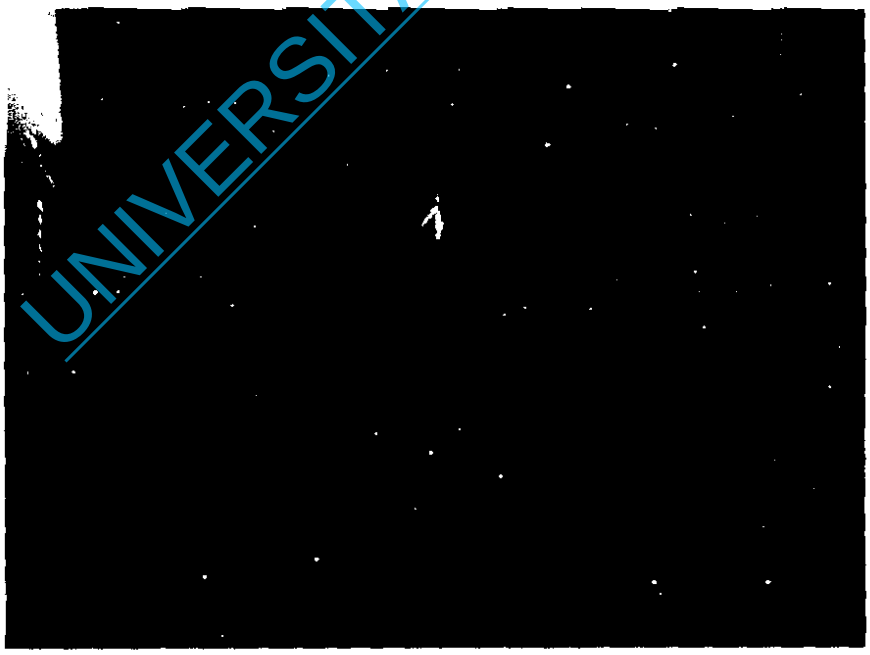

Gambar 2. Wawancara dengan Lurah Nunukan Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 3. Wawancara dengan Camat Nunukan.

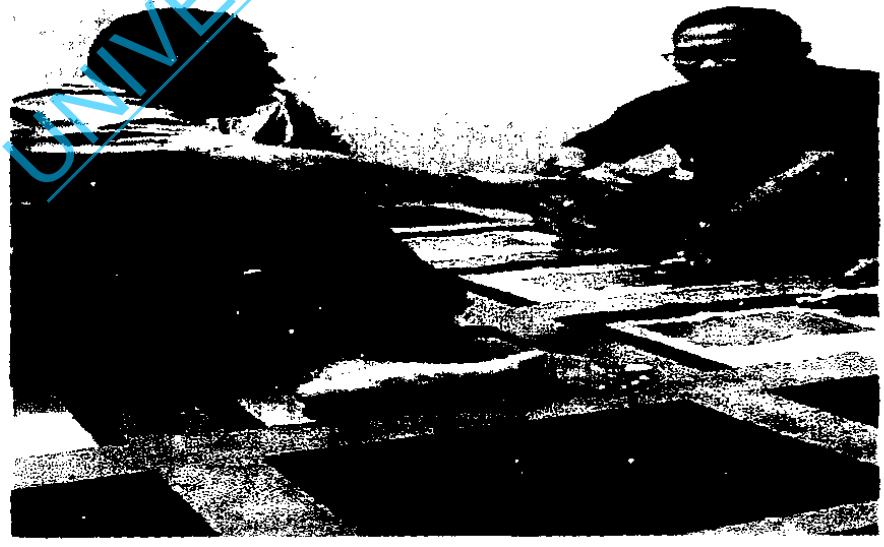

Gambar 4. Wawancara dengan Anggota DPRD Kab. Nunukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4.

BIODATA PENULIS

1.	N A M A	:	Yance Tambaru,S.E.
2.	TEMPAT/TGL. LAHIR	:	Tarakan, 1 Januari 1971
3.	AGAMA	:	Kristen Protestan.
4.	JENIS KELAMIN	:	Laki-laki
5.	ALAMAT RUMAH	:	Jl. Pongtiku RT. 16, No. 24 Nunukan.
6.	PEKERJAAN	:	Pegawai Negeri Sipil.
7.	TEMPAT KERJA	:	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Nunukan.
8.	ALAMAT KANTOR	:	Kantor Bupati Nunukan Jl. Ujang Dewa, Sedadap, Nunukan. Kalimantan Utara.
9.	PENDIDIKAN S_1	:	Universitas Hasanuddin, Makassar.
10.	PENDIDIKAN S_2	:	Universitas Terbuka.

UNIVERSITAS TERBUKA